



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

2024

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jalan Taman Bhakti No 2, Wonosari ☎ (0274)391317

✉ pertanian@gunungkidulkab.go.id 🌐 <https://pertanian.gunungkidulkab.go.id/>



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 20 Februari 2025

KEPALA,



RISMIYADI, SP, M.Si

NIP 197410121999031008



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Produksi tanaman Pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan meningkat”:
 - Diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu (1) Produksi komoditas Tanaman Pangan (Angka kumulatif produksi laporan statistik tanaman pangan pada tahun ke n. Komoditas tanaman pangan yang mendukung produksi meliputi padi, jagung, kedelai dan ubi kayu dan (2) Produksi perkebunan dan hortikultura (Angka kumulatif produksi laporan statistik perkebunan dan hortikultura pada tahun ke n. Komoditas tanaman perkebunan yang mendukung produksi meliputi kakao, mete, tembakau, kelapa dan komoditas tanaman hortikultura meliputi cabe, bawang merah, pisang, alpukat dan durian
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) Program, yakni Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 untuk produksi tanaman pangan sebesar 1.581.224,78 ton; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 1.184.277,54 ton. Dengan demikian capaian ini belum melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 74,90%
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 untuk produksi Perkebunan dan hortikultura sebesar 34.056,68 ton; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 37.303,13 ton. Dengan demikian capaian ini telah



melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 108,71%

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 1.557.284,61 ton dan capaian target 2024 sebesar 1.221.580,67 ton terjadi penurunan sebesar 335.703,94 ton

2. Capaian sasaran strategis 2 “Ketahanan Pangan Meningkat.”:

- Diukur dengan indikator Capaian Skor PPH Konsumsi (Jumlah angka yang dicapai dalam keragaman konsumsi kelompok pangan (%AKG x bobot masing-masing kelompok pangan)).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) Program yakni Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Program Pengawasan Keamanan Pangan; Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 90 (indeks); sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 terealisasi 91,3 (indeks). Dengan demikian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 101,44%
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 93,10 (indeks) terjadi penurunan sebesar 2 (indeks).

3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD”:

- Diukur dengan indikator sasaran Nilai AKIP PD adalah berdasarkan LHE AKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Nilai AKIP yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja tahun 2024 adalah realisasi Nilai AKIP PD t-1 atau Nilai AKIP PD tahun 2023 yaitu sebesar 81,33. Dengan target Nilai AKIP PD tahun 2023 sebesar 80,20 maka capaian kinerjanya sebesar 101,41



Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Diversifikasi konsumsi belum maksimal, menyebabkan kebutuhan bahan pangan pokok menjadi makin tinggi.
2. Pasar bebas yang sudah mulai terasa pengaruhnya terhadap produk pertanian, sehingga perlu penguasaan informasi pasar dengan teknologi.
3. Pengembangan sumber energi yang terbarukan banyak memanfaatkan produk-produk pertanian, seperti jagung dan ketela pohon. Di masa datang akan terjadi kompetisi penggunaan produk pertanian yaitu sebagai bahan pangan manusia, bahan industri pakan ternak dan bahan baku industri bio energi. Beban penyediaan produk pertanian akan semakin berat seiring besarnya tuntutan kebutuhan akan produksi di tiga sektor tersebut;
4. Peredaran pupuk palsu, penambahan zat pemutih pada beras, dan masih banyak lagi pemalsuan lainnya.
5. Belum maksimalnya promosi produk pertanian.
6. Pewilayahan (zoning) komoditas unggulan, andalan, dan potensial yang telah terformulasi melalui proses identifikasi yang panjang tidak diikuti rekomendasi yang tegas (imperatif) bagi implementasinya pada tingkat petani.
7. Perilaku pasar penumpukan produksi jauh melebihi daya serap pasar pada saat panen. Penetapan quota belum menjadi sesuatu yang dipandang urgen dalam menjaga posisi petani pada situasi tarik ulur antara permintaan (demand) dengan penawaran (supply);
8. Petani seringkali dalam posisi tawar yang lemah dan harus berhadapan dengan industri pangan skala besar yang lebih bersifat padat modal dan padat teknologi.
9. Air merupakan faktor utama dalam budidaya pertanian. Seperti halnya penggunaan lahan, dengan semakin pesatnya pembangunan berbagai sektor sumberdaya air bagi pertanian juga semakin terbatas.



10. Selama ini petani sering menjual produknya dalam bentuk primer tanpa memberikan sentuhan teknologi untuk menjadi bahan setengah jadi. Akibatnya nilai tambah produk pertanian tanaman pangan dinikmati oleh pelaku yang lain, dalam hal ini bukan petani.
11. Terjadinya penurunan produktivitas lahan karena penggunaan pupuk kimia, khususnya urea dalam jangka waktu yang panjang dan dalam dosis yang berlebihan.
12. Akibat dari pemanasan global dimungkinkan terjadi anomali iklim dan perubahan kualitas lingkungan yang sulit diprediksi. Hal ini harus disosialisasikan dan diupayakan meminimalkan kemungkinan kerugian yang akan timbul dari perubahan alam tersebut;
13. Perubahan pola kehidupan masyarakat, pada peningkatan tuntutan konsumen akan kandungan nutrisi dari produk-produk yang sehat, aman, dan menunjang kebugaran.
14. Menurunnya sumber daya manusia di sektor pertanian dikarenakan generasi muda lebih memilih bekerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sehingga perlu upaya terobosan di sektor agribisnis untuk menambah minat generasi muda bergerak di sektor pertanian.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I _PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	4
D. Tugas dan Fungsi.....	7
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	9
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	15
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	20
BAB II _PERENCANAAN KINERJA	24
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	24
B. Strategi dan Arah Kebijakan	26
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	26
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	32
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	35
BAB III _AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
A. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	37
B. Analisa Program Kegiatan PUG	100
C. Capaian Kinerja Lainnya	102
D. Efisiensi Anggaran	102
E. Inovasi.....	109
BAB IV PENUTUP	110
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	15
Tabel I.2	Sarana-Prasarana	16
Tabel I.3	Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2024.....	18
Tabel I.4	Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	21
Tabel II.1	Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026	24
Tabel II.2	Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2024-2026	25
Tabel II.3	Strategi dan Arah Kebijakan.....	26
Tabel II.4.1.	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	27
Tabel II.4.2.	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	30
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Pangan 2024	32
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024.....	33
Tabel II.7	Anggaran Tahun 2024.....	33
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	37
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2024.....	38
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	39
Tabel III.4	Capaian Sasaran Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura.....	40
Tabel III.5	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2024 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	42
Tabel III.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Program	44
Tabel III.7	Capaian Kinerja Program pada Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura.....	44
Tabel III.8	Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam, Luas panen , Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2020-2024.....	46
Tabel III.9	Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung Tahun 2020-2024	49



Tabel III.10	Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam, Luas Panen , Produksi dan Produktivitas Kedelai Tahun 2020-2024	50
Tabel III.11	Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam, Luas panen , Produksi dan Produktivitas Ubi Kayu Tahun 2020-2024	51
Tabel III.12	Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam dan Produksi Mete Tahun 2020-2024	54
Tabel III.13	Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam dan Produksi Kelapa Tahun 2020-2024	56
Tabel III.14	Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam dan Produksi Bawang Merah Tahun 2020-2024	58
Tabel III.15	Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam dan Produksi Cabe Tahun 2020-2024	59
Tabel III.16	Produksi Komoditas Pisang, Durian, Alpukat Tahun 2023-2024.	60
Tabel III.17	Alokasi Pupuk Bersubsidi TA 2024	61
Tabel III.18	Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kios ke Petani	61
Tabel III.19	Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Distributor Ke Kios	62
Tabel III.20	Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024	64
Tabel III.21	Data Sarana Pertanian Tahun 2024	66
Tabel III.22	Data Prasarana Pertanian Tahun 2024	66
Tabel III.23	Sumber Daya Pertanian Tahun 2024	72
Tabel III.24	Penerima DAK Fisik Aspirasi Pertanian Tahun 2024	72
Tabel III.25	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	81
Tabel III.26	Capaian Sasaran Ketahanan Pangan Meningkat	81
Tabel III.27	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	82
Tabel III.28	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Program	82
Tabel III.29	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	83
Tabel III.30	Skor PPH Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024	85
Tabel III.31	Ketersediaan Pangan Perkapita Berdasarkan Jenis Bahan Makanan Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2023	87
Tabel III.32	Klasifikasi Lapangan Usaha Baku Indonesia (KBLI)	90
Tabel III.33	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungannya	97
Tabel III.34	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	97



Tabel III.35	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2024 Serta Perbandingannya dengan target Akhir renstra di tahun 2026	98
Tabel III.36	Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024	98
Tabel III.37	Capaian Kinerja Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD	99
Tabel III.38	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	103
Tabel III.39	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	108



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Cascading Kinerja	3
Gambar I.2. Mandat Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunugkidul.....	4
Gambar I.3. Peta Proses Bisnis Manajemen, Proses Utama Dan Proses Lainnya Dinas Pertanian Dan Pangan.....	5
Gambar I.4. Peta Relasi Dinas Pertanian dan Pangan.....	6
Gambar I.5. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan.....	7
Gambar II.1. E-SAKIP	35
Gambar II.2. SIPANDA	36
Gambar II.3. SPIP Terintegrasi	36
Gambar III.1. PENJAB KAB	69
Gambar III.2. Contoh Dokumen NIB dan Register PSAT.....	90
Gambar III.3. Peta Ketahanan dan Kerentanan pangan Tahun 2024	94



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
- G. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.



Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

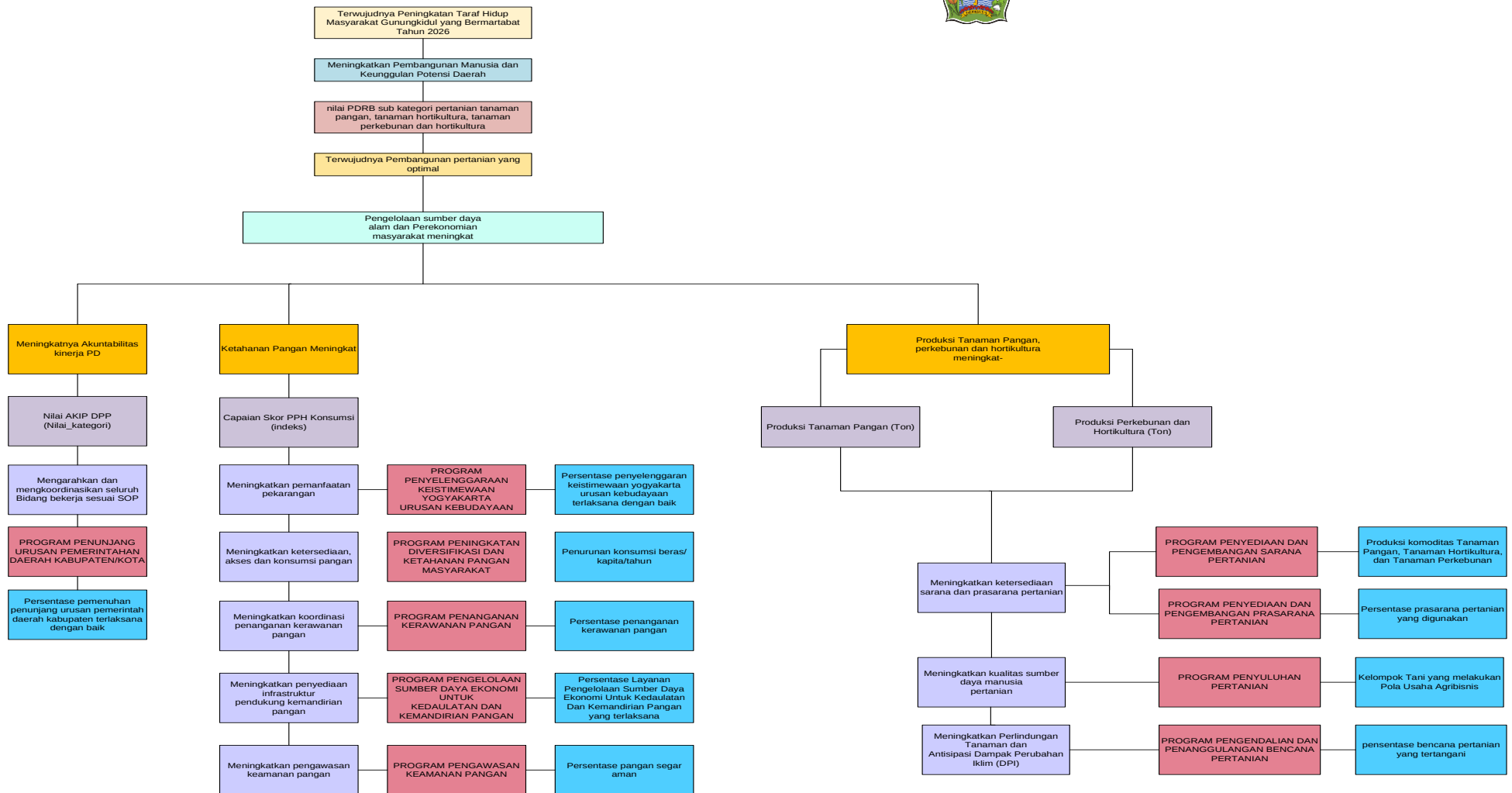
Bertitik tolak dari Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024, maka LKjIP Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2024 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**

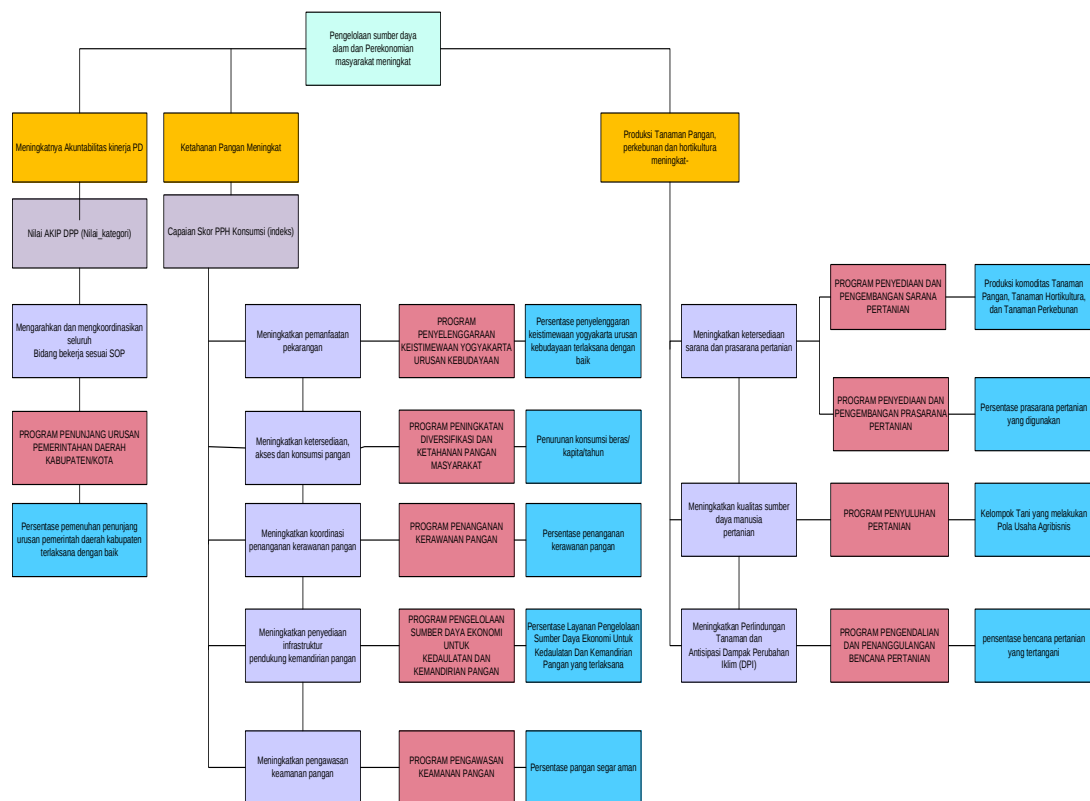


Gambar 1.1. Cascading Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan

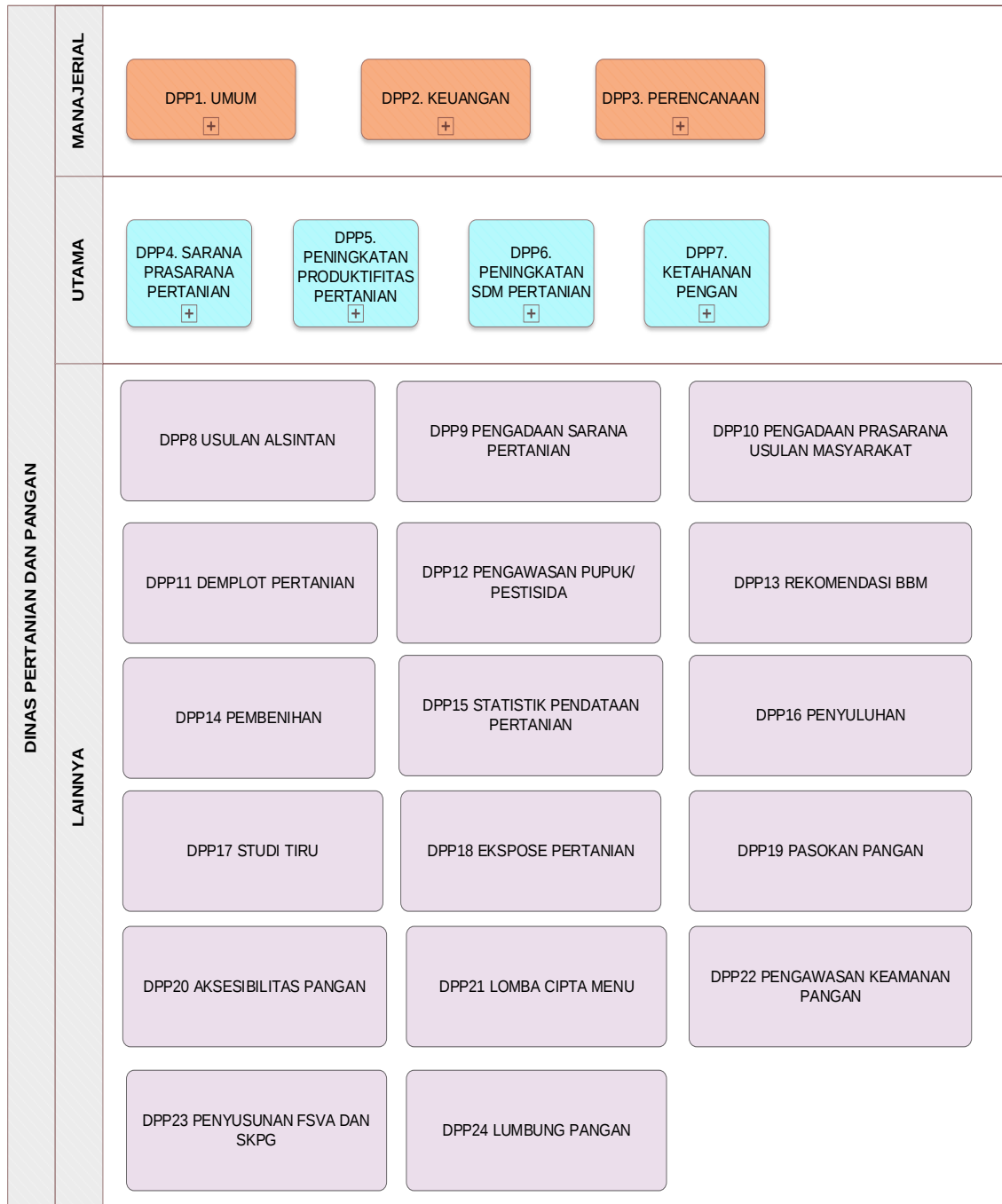


C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

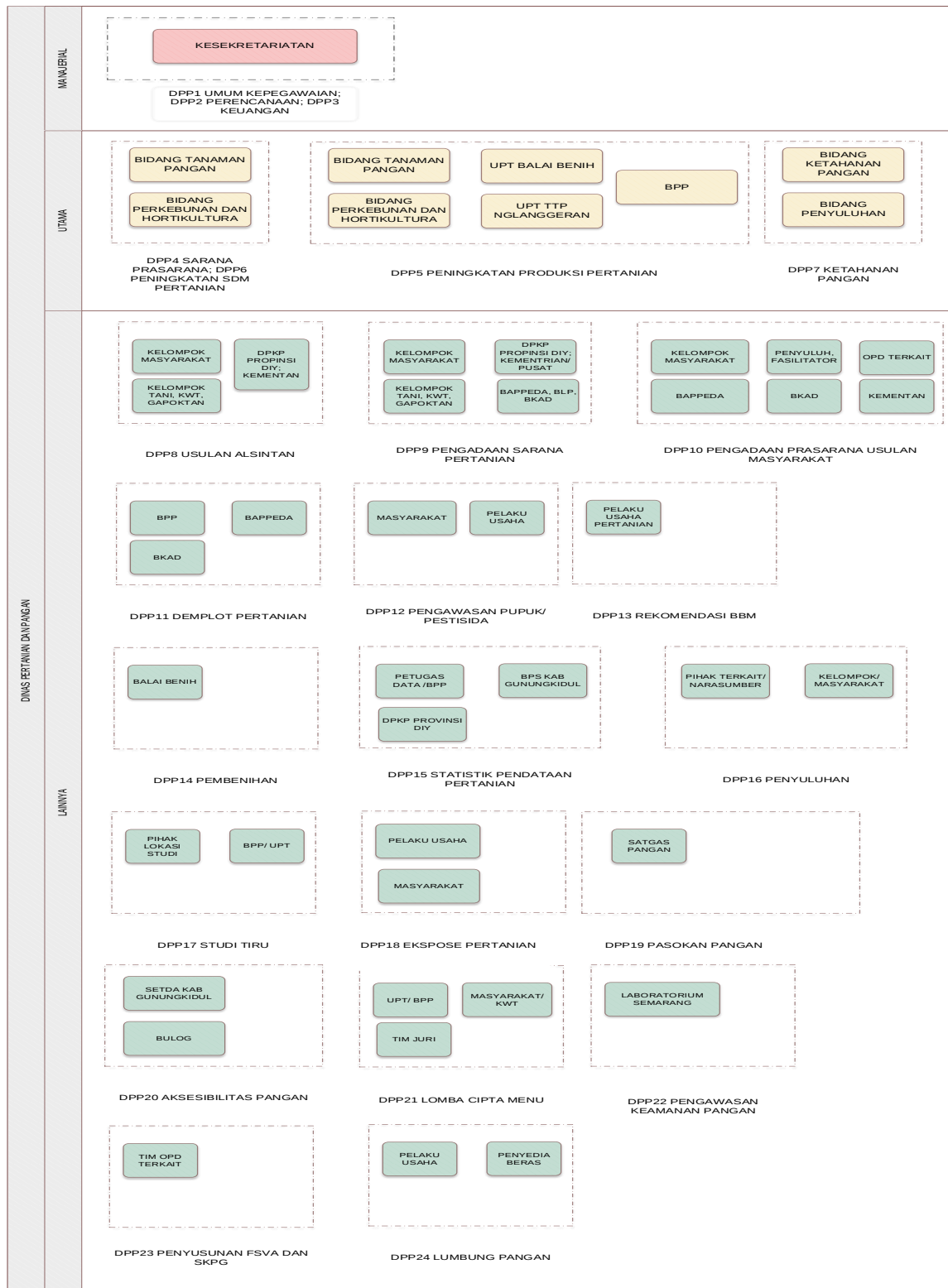


Gambar 1.2. Mandat Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan

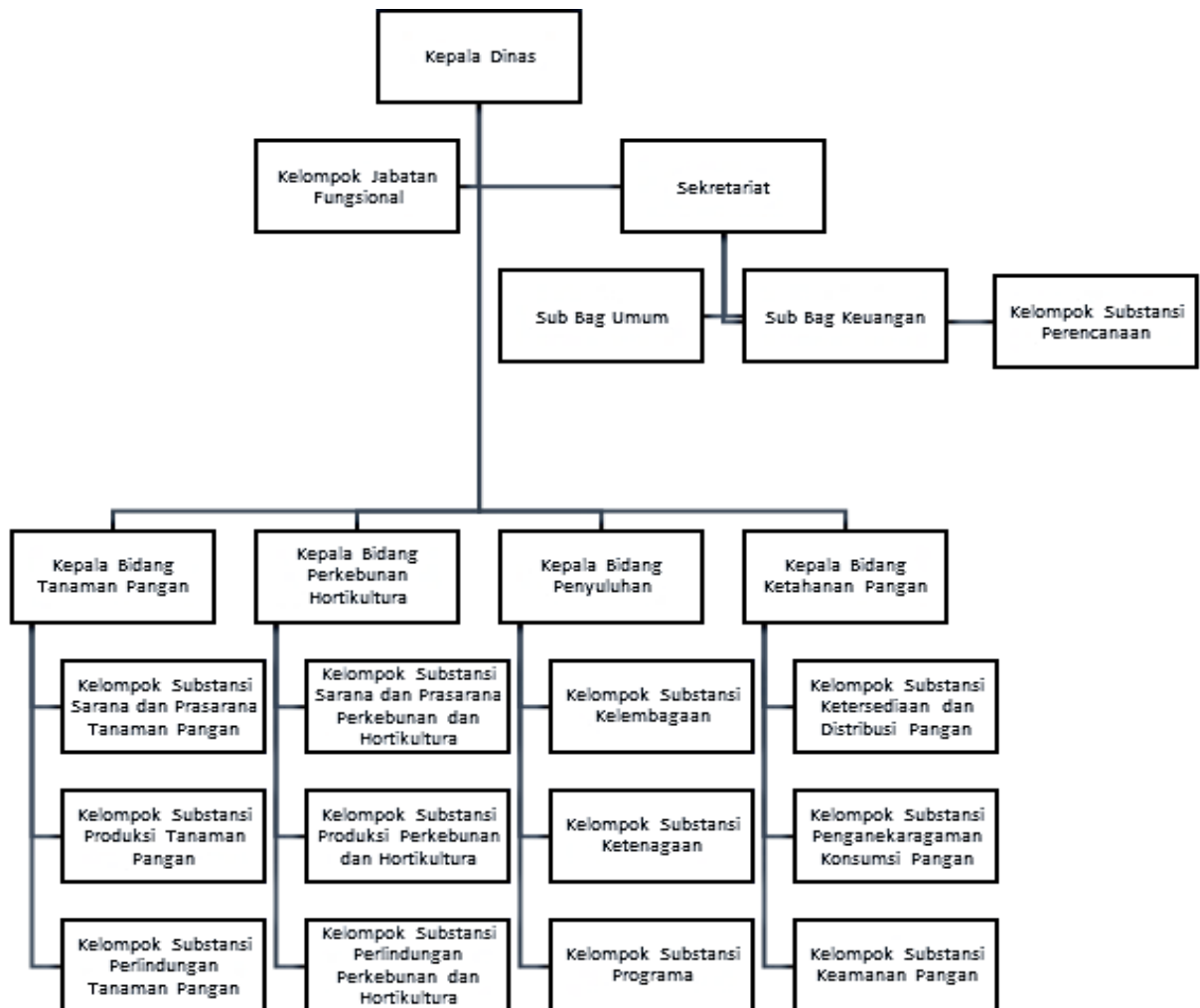


Gambar 1.3. Peta Proses Bisnis Manajemen, Proses Utama Dan Proses Lainnya Dinas Pertanian Dan Pangan

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



Gambar 1.4. Peta Relasi Dinas Pertanian dan Pangan



Gambar 1.5. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan

D. Tugas dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan.



Dinas Pertanian dan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas.

1. Tugas Pokok

Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian, selain sub bidang peternakan dan sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan urusan pemerintahan bidang pangan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pertanian dan pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pertanian dan pangan;
- d. pembinaan di bidang pertanian dan pangan;
- e. pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- f. pembinaan dan fasilitasi pascapanen, pengolahan, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- g. pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- h. pemberian rekomendasi teknis usaha di bidang pertanian dan pangan;
- i. penataan prasarana pertanian;
- j. pelaksanaan perlindungan tanaman;
- k. pembinaan perbibitan dan perbenihan pertanian;
- l. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman;
- m. pengelolaan sarana dan prasarana pertanian dan pangan;



- n. pengawasan standar mutu alat, mesin, pupuk, pestisida pertanian;
- o. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- p. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketahanan pangan;
- q. pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan;
- r. pengelolaan dan pengembangan statistik dan sistem informasi pertanian dan pangan;
- s. pengelolaan sistem informasi penyuluhan pertanian dan pangan;
- t. pengembangan kerja sama dan kemitraan penyuluhan pertanian dan pangan;
- u. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
- v. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pertanian dan pangan;
- w. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan;
- x. pengelolaan UPT; dan
- y. pengelolaan kesekretariatan Dinas.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Tinjauan dan identifikasi permasalahan bertujuan untuk memahami kondisi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat dieliminir dampaknya. Permasalahan pembangunan di Dinas Pertanian dan Pangan dengan 2 kewenangan yang dimiliki meliputi urusan ketahanan pangan dan urusan pertanian.



Ketahanan Pangan

- a. Belum optimalnya stabilisasi harga dan pasokan pangan;
- b. Ketersediaan pangan sudah mencukupi secara agregat, namun masih kurang beragam dan mayoritas tersedia hanya saat musim panen

Ketersediaan pangan dapat dilihat dari data Neraca Bahan Makanan yang disusun berdasarkan angka produksi, impor dan ekspor pangan. Berdasarkan standar ketersediaan energi mencapai 3.056 kkal/kap/hari dari standart sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein sebesar 83,37 gram/kap/hari dari standart sebesar 63 gram/kap/hari.

- c. Keterjangkauan pangan dan belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat di tingkat daerah;

Distribusi pangan yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat tempat merupakan permasalahan sebagian besar daerah. Khususnya terhadap komoditas pangan yang dibatasi oleh musim panen seperti padi/beras. Mengingat beras merupakan komoditas pangan pokok yang strategis bagi seluruh masyarakat Indonesia, Pemerintah harus turut memastikan pasokannya selalu mencukupi setiap saat. Penguatan system distribusi dilakukan dengan menggandeng Gabungan Kelompok Tani (Gappoktan) sebagai pelakunya melalui penumbuhan kegiatan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM), Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) serta Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Untuk optimalisasi cadangan pangan masyarakat dilaksanakan kembali gerakan menyimpan hasil panen melalui kelompok lumbung pangan.

Dinas Pertanian dan Pangan ikut serta dalam meningkatkan daya beli pangan dengan melaksanakan Gerakan Pangan Murah, Pekan Tani dan Pasar Tani.

- d. Konsumsi pangan dan belum optimalnya penerapan pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) di masyarakat;
Konsumsi pangan yang memenuhi kaidah beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) ditunjukkan dengan skor PPH konsumsi mendekati 100.



Kelompok pangan yang masih kurang dikonsumsi masyarakat Gunungkidul adalah protein hewani serta sayur dan buah. Untuk itu ditumbuhkan kegiatan pemanfaatan pekarangan kepada kelompok wanita agar membudidayakan sayur, buah, umbi-umbian dan ternak di pekaranganya sebagai sumber pangan keluarga dan sebagai sumber pendapatan keluarga.

- e. Masih terdapatnya produk pangan yang belum memenuhi standar keamanan pangan. Sosialisasi dari stakeholders terkait perlu ditingkatkan untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Apalagi Kabupaten Gunungkidul telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Keamanan Pangan, dalam rangka menjamin pangan yang beredar di Kabupaten Gunungkidul memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenis pangan.

Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT) juga dilaksanakan dengan sasaran para pelaku usaha yang mengedarkan (menjual) pangan segar asal tumbuhan, asal hewan dan asal ikan yang ada di pasar tradisional di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan took swalayan, minimarket yang menjual pangan segar asal tumbuhan yang dikemas dan masa simpannya lebih dari 7 (tujuh) hari.

- f. Kerawanan pangan adalah kondisi masyarakat, daerah atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Kerawanan pangan juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan dapat bersifat kronis (*cronical*) dan mendadak/ sementara (*transien*). Kerawanan pangan kronis adalah kondisi kekurangan pangan yang terjadi secara terus-menerus, yang disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan kemiskinan.



Sedangkan, kerawanan *transien* adalah kondisi kerawanan pangan yang bersifat sementara akibat kejadian yang mendadak seperti bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang, konflik sosial dan sebagainya.

- g. Ketergantungan konsumsi pangan masyarakat terhadap pangan beras masih sekitar 87,80 kg/kapita/tahun. Diversifikasi pangan perlu ditekankan sebagai salah satu strategi menjaga ketersediaan pangan dan untuk mengurangi ketergantungan konsumsi pangan yang cenderung fokus pada satu komoditas sumber karbohidrat. Hal ini dibarengi dengan upaya peningkatan penyediaan dan konsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, gembili, suweg, ganyong dan garut, karena capaian diversifikasi pangan adalah menurunnya konsumsi beras dan meningkatnya konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat non beras.

Pertanian

- a. Mayoritas petani masih mengandalkan pola pertanian konvensional yang belum secara optimal mensejahterakan petani;
- b. Belum optimalnya penerapan industri pertanian yang berorientasi pada pengembangan produk pertanian yang berdaya saing tinggi;
- c. Program kegiatan untuk meningkatkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian belum terencana optimal.
- d. Alih Fungsi Lahan. Secara umum, produksi komoditas pertanian khususnya dari sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, sangat bergantung pada kondisi iklim/cuaca karena mayoritas lahan pertanian merupakan lahan kering yang tidak beririgasi. Selain itu, laju alih fungsi lahan pertanian juga cukup berperan terhadap capaian produksi pertanian. Berdasarkan data BPS selama periode 2009-2019 (10 tahun), terdapat pengurangan jumlah lahan sawah sebanyak 2 hektar dan lahan tegalan/ kebun sebanyak 2.663 hektar. Berdasar Surat Keputusan Bupati Gunungkidul nomor 388/KPTS/2021 tentang Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan



Berkelanjutan tanggal 6 Desember 2021 ditetapkan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun 2021 dengan luasan 22.234,17 (dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat koma tujuh belas) Ha terdiri dari : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 21.576,24 (dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam koma dua puluh empat) Hektar, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 657,92 (Enam ratus lima puluh tujuh koma sembilan puluh dua) Hektar.

Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini membutuhkan upaya keras untuk mempertahankannya, mengingat mayoritas berada di lahan kering serta meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan sektor lainnya.

Tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk menjaga agar KP2B tersebut tidak beralih fungsi dan dapat berkontribusi untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani

- e. Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I Kabupaten Gunungkidul, jumlah rumah tangga usaha pertanian menurut kelompok umur kepala rumah tangga menunjukkan bahwa RTUP di Kabupaten Gunungkidul dengan kategori rentang umur ≥ 65 tahun sebanyak 44.517 Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) atau 30,93%; umur 55–64 tahun sebanyak 40.867 RTUP (28,39%), umur 45-54 tahun sebanyak 35.784 RTUP (22,86%); umur 35-44 tahun sebanyak 18.102 RTUP (12,58%); disusul kelompok umur 25-34 tahun sebanyak 4.495 RTUP (3,12%) dan terakhir kelompok umur 15-24 tahun sebanyak 178 RTUP (0,12%). Artinya 30,93% RTUP di Kabupaten Gunungkidul memiliki kepala rumah tangga dengan umur ≥ 65 tahun ke atas (usia tua). Dari total petani 143.943 orang di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023, sebanyak 60.266 petani merupakan petani milenial.



Secara umum, sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan, kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat terbatas dan belum sepenuhnya untuk menekuni, sehingga diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi (vocational training), serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru

- f. Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu kunci dari perubahan sektor pertanian di era digitalisasi adalah penggunaan internet oleh petani. Penggunaan teknologi digital mencakup penggunaan internet/ telepon pintar/ teknologi informasi, penggunaan drone, dan penggunaan kecerdasan buatan untuk kegiatan usaha pertanian. Jumlah petani milenial yang menggunakan Internet menurut data Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Gunungkidul tahap I berdasar data BPS, dari 60.266 petani milenial sekitar 53.970 menggunakan teknologi. Sedangkan jumlah petani milenial berumur 19-39 tahun yang tidak menggunakan teknologi sebanyak 6.296 orang.

Dari data terlihat bahwa aplikasi teknologi tepat guna telah banyak dimanfaatkan oleh petani di sektor pertanian oleh sekitar 90% yang memanfaatkannya. Secara umum, sinyal internet telah merata pada sebagian besar perdesaan dan telah terjangkau sinyal 2G, 3G dan 4G. Berdasarkan data tersebut, era industri 4.0 yang salah satunya menggunakan keterhubungan semua perangkat dengan internet dapat dijadikan modal awal transformasi digital di pertanian.

- g. Kelembagaan dan sumber daya manusia. Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 memiliki penyuluh PNS 53 orang, Penyuluh P3K sebanyak 47 orang dan penyuluh swadaya sebanyak 144 orang. Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin meningkatnya kebutuhan agribisnis petani, peran BPP (Balai penyuluh Pertanian) berkembang tidak hanya sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha, tetapi diupayakan sebagai tempat untuk mengenalkan model-model usahatani



dan kemitraan agribisnis, metodologi penyuluhan melalui fasilitas informasi, serta melaksanakan forum-forum penyuluhan (rembug tani, koordinasi musyawarah, dll) dan pelaksanaan program penyuluhan. Oleh sebab itu, guna menghasilkan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani dan dapat mencapai target pembangunan pertanian, penyelenggara penyuluhan di lapangan juga harus didukung dengan sarana dan prasarana terstandarisasi dan tepat guna.

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan,
Jenis Kelamin dan Kompetensi**

No	Jabatan	formasi					pegawai yang ada						Laki-laki	Perem puan
		jml	kualifikasi				jml	Kualifikasi						
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP		
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1					1	
B	Jabatan Administrasi													
	Administrator						3	2	1				1	2
	Pengawas						6	2	4				2	4
	Pelaksana						13		6	1	5	1	8	5
C	Jabatan Fungsional						112	5	68	16	23		61	51
	Jumlah						135	10	79	17	28	1	73	62

Sumber: Data Kepegawaian Sub Bag Umum Desember 2023

Berdasarkan data pada table I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 79 orang (58,52%) , disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 28 orang (20,74%), D3 17 orang (12,59%), SLTP 1 orang (0,74%). Komposisi pegawai laki-laki (54,07%) sedikit lebih banyak



dibanding pegawai Perempuan (45,93%) ; tetapi untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Total aset yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul sebanyak 3.687 Unit dengan nilai aset Rp42.442.695.674,06 Sarana prasarana sebagaimana pada table 1.2 dibawah ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul beserta 18 Balai Penyuluh Pertanian di 18 Kapanewon dan 2 Unit Pelaksana Teknis.

Tabel 1.2 Sarana-Prasarana

No	Nama Barang	Saldo Akhir	
		Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
1	Aset	3.687	42.442.695.674,08
2	Aset Tetap	3.422	40.734.655.176,67
3	Tanah	8	1.496.267.000,00
4	Tanah	8	1.496.267.000,00
5	Peralatan Dan Mesin	3.016	12.304.415.166,21
6	Alat Besar	31	133.896.500,00
7	Alat Angkutan	164	3.278.235.951,33
8	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	65	368.214.357,16
9	Alat Pertanian	135	1.484.167.366,00
10	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	2.137	3.516.250.231,72
11	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	133	527.297.713,00
12	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1	35.640.000,00
13	Alat Laboratorium	67	337.890.019,00
14	Alat Persenjataan	0	0
15	Komputer	283	2.622.823.028,00
16	Alat Eksplorasi	0	0
17	Alat Pengeboran	0	0
18	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0	0
19	Alat Bantu Eksplorasi	0	0
20	Alat Keselamatan Kerja	0	0
21	Alat Peraga	0	0

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



No	Nama Barang	Saldo Akhir	
		Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
22	Peralatan Proses/Produksi	0	0
23	Rambu - Rambu	0	0
24	Peralatan Olah Raga	0	0
25	Gedung Dan Bangunan	165	24.564.860.144,33
26	Bangunan Gedung	128	21.182.580.110,33
27	Monumen	0	0
28	Bangunan Menara	1	10.822.500,00
29	Tugu Titik Kontrol/Pasti	36	3.371.457.534,00
30	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	35	2.150.496.508,63
31	Jalan Dan Jembatan	5	690.993.625,43
32	Bangunan Air	15	1.285.530.368,70
33	Instalasi	4	6.296.522,00
34	Jaringan	11	167.675.992,50
35	Aset Tetap Lainnya	198	218.616.357,50
36	Bahan Perpustakaan	1	156.100,00
37	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	0	0
38	Hewan	55	190.850.000,00
39	Biota Perairan	0	0
40	Tanaman	142	27.610.257,50
41	Barang Koleksi Non Budaya	0	0
42	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0
43	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
44	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
45	Aset Lainnya	265	1.708.040.497,41
46	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0
47	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0
48	Aset Tidak Berwujud	14	843.906.000,00
49	Aset Tidak Berwujud	14	843.906.000,00
50	Aset Lain-Lain	251	864.134.497,41
51	Aset Lain-Lain	251	864.134.497,41
TOTAL		3.687	42.442.695.674,08

Sumber: Data Aset Sub Bag Umum Desember 2024



Kendaraan dinas terdiri dari yakni kendaraan roda 2, kendaraan roda 3 dan roda 4 dan roda 4 pick up. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang tamu, ruang gudang, kantin, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Alat pertanian dan labortorium juga tersedia dalam kondisi baik. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, Anggaran Belanja daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 berdasarkan DPPA-SKPD Nomor DPAA/A.6/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024 Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul semula Rp19.306.921.271,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp20.991.950.279,00 atau bertambah Rp1.685.029.008,00

Tabel I.3 Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2024

No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
3	Pajak Daerah	-	-	-
4	Retribusi Daerah	176.207.000,00	182.407.000,00	6.200.000,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
6	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	176.207.000,00	182.407.000,00	6.200.000,00
8	JUMLAH PENDAPATAN	176.207.000,00	182.407.000,00	6.200.000,00
9	BELANJA DAERAH			
10	BELANJA OPERASI			
11	Belanja Pegawai	9.359.775.870,00	10.780.576.178,00	1.420.800.308,00
12	Belanja Barang dan Jasa	7.430.910.401,00	7.436.388.941,00	5.478.540,00
13	Belanja Bunga	-	-	-

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
14	Belanja Subsidi	-	-	-
15	Belanja Hibah	1.622.292.000,00	1.742.292.000,00	120.000.000,00
16	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
17	JUMLAH BELANJA OPERASI	18.412.978.271,00	19.959.257.119,00	1.546.278.848,00
18	BELANJA MODAL			
19	Belanja Modal Tanah	-	-	-
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	976.350.000,00	1.063.631.200,00	87.281.200,00
21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	35.000.000,00	35.000.000,00
22	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	16.923.960,00	16.923.960,00
23	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
24	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	-
25	JUMLAH BELANJA MODAL	1.076.350.000,00	1.215.555.160,00	139.205.160,00
26	JUMLAH BELANJA	19.489.328.271,00	21.174.357.279,00	1.685.029.008,00
27	SURPLUS / (DFISIT)	(19.306.921.271,00)	(20.991.950.279,00)	(1.685.029.008,00)

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024 sebelum perubahan berupa Retribusi Penjualan Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman sebesar Rp176.207.000,00 yang terdiri dari Penjualan benih padi Rp103.662.000,00 dan Penjualan Produksi BPP Rp72.545.000,00. Setelah perubahan Rp182.407.000,00 bertambah pada PAD untuk Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah berupa pemakaian ruang di Taman Teknologi Pertanian (TTP) Nglanggeran Rp6.200.000,00.

Belanja Operasional sebelum perubahan Rp1.8412.978.271,00 menjadi Rp19.959.257.119,00 setelah perubahan, atau ada penambahan sebesar Rp1.546.278.848,00 yang terdiri dari penambahan belanja pegawai Rp1.420.800.308,00 yang direncanakan untuk pembayaran tunjangan fungsional PPPK dan penambahan belanja barang dan jasa sebesar Rp5.478.540,00 yang digunakan untuk penambahan belanja alat mesin pertanian yang mengalami kenaikan harga di e-katalog sehingga



pelaksanaan pengadaan dimundurkan di triwulan IV setelah ada penambahan harga per unit alat mesin traktor.

Belanja modal sebelum perubahan sebesar Rp1.076.350.000,00 menjadi Rp1.215.555.160,00 atau bertambah sebesar Rp139.205.160,00 yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin Rp87.281.200,00; Belanja modal Gedung dan bangunan Rp35.000.000,00 dan Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp16.923.960,00.

G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 sesuai surat Nomor 700.1.2.7/EV.LKJIP/010 Tanggal 28 Maret 2024 oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang menunjukkan kategori peringkat A (81,33) dengan interpretasi Dinas Pertanian dan Pangan menunjukkan predikat memuaskan yang ditandai dengan terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/Sub Koordinator.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 pada kondisi pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal membutuhkan beberapa hal untuk ditindaklanjuti sesuai hasil rekomendasi dari Tim Evaluator. Untuk saran/ rekomendasi dan tindak lanjut dari Dinas Pertanian dan Pangan telah disampaikan pada tanggal 16 April 2024 no mer surat B/700.1.2.7/590/2024 perihal Tindak lanjut LHE AKIP pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023, seperti yang tertera di tabel I.4 di bawah ini.



Tabel I.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

No	Kondisi	Saran/ Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	PERENCANAAN KINERJA		
	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	---	nihil
	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	---	nihil
c	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	---	nihil
2	PENGUKURAN KINERJA		
a	Pengukuran kinerja telah dilakukan namun belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Melakukan review SOP Pengumpulan Data Kinerja sebagai dasar mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang digunakan Dinas Pertanian dan Pangan adalah Perbup Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 239/KPTS/2020 Tentang SOP Pengumpulan Data Kinerja Tindak lanjut yang akan dilakukan dengan menyusun review SOP yang baku mengenai mekanisme pengumpulan data kinerja yang dibutuhkan dalam penyusunan LKjIP dan ditetapkan melalui SOP 2024.
b	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam	Pengukuran kinerja agar dipergunakan sebagai	Dalam Pengukuran Kinerja (Laporan TEPR/ Laporan

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



No	Kondisi	Saran/ Rekomendasi	Tindak lanjut
	mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telaah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	dasar dalam penyesuaian kebijakan untuk mencapai kinerja	pengendalian), Pimpinan telah terlibat sebagai pengambil keputusan dan telah memanfaatkan teknologi informasi dalam hal pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja. Tindak lanjut yang dilakukan dengan mengoptimalkan setiap level organisasi untuk melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya.
c	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , namun belum dijadikan dasar penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul digunakan sebagai dasar penyesuaian tunjangan kinerja. Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam hal pengukuran kinerja dengan melakukan sosialisasi tentang tambahan penghasilan PNS dalam bentuk undangan, daftar hadir dan notulen sosialisasi
3	PELAPORAN KINERJA		
a	Telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	Melakukan koordinasi dan sosialisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai	Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala, telah diformalkan, telah direview, dipublikasikan dan telah disampaikan tepat waktu
b	Dokumen Laporan Kinerja belum memenuhi standar	Informasi dalam laporan kinerja berkala agar digunakan sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai standar dengan menyajikan informasi realisasi kinerja dengan target tahunan serta akan menginfokan perbandingan realisasi

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



No	Kondisi	Saran/ Rekomendasi	Tindak lanjut
			kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya Tindak lanjut akan dilaksanakan pada penyampaian informasi atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/ atau hambatannya, efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta perbandingan realisasi kinerja di level provinsi/ pusat.
c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	---	nihil
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan namun belum terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Hasil evaluasi kinerja internal agar dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja	Pedoman yang digunakan Permen Pan & RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tindak lanjut akan dilakukan dalam hal evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit dan dilaksanakan secara berjenjang
b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai	---	nihil
c	Implementasi SAKIP telah meningkat namun belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	---	nihil



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah:

“Terwujudnya Pembangunan Pertanian yang Optimal”

Adapun sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Produksi tanaman Pangan, perkebunan dan hortikultura meningkat	Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.490023,44	1.519.823,91	1.550.220,39	1.581.224,78	1.612.849,29	1.645.106,28	1.645.106,28

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Produksi perkebunan dan hortikultura	Ton	34.110,53	33.842,34	33.949,10	34.056,68	34.165,26	34.272,84	34.272,84
2	Ketahanan Pangan Meningkat	Capaian skor PPH Konsumsi	Indeks	89,7	89,9	90	90,1	90,2	89,8	89,8

Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2021-2026 yang digunakan sebagai target kinerja per tahun, dalam perjalanannya mengalami perubahan target. Hal ini berdasarkan catatan hasil pelaporan kinerja tahun 2023 bahwa informasi dalam laporan kinerja di Dinas Pertanian dan Pangan belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.

Bentuk tindak lanjut yang dilaksanakan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa target kinerja yang diperjanjikan mencakup outcome yang dihasilkan dari tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya, maka Dinas Pertanian dan Pangan memanfaatkan hasil laporan kinerja (LKJIP 2024) untuk penetapan target pada perjanjian kinerja 2025.

Tabel II.2 Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2024-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET TAHUNAN			Target Akhir Renstra
				2024	2025	2026	
1.	Produksi tanaman Pangan, perkebunan dan hortikultura meningkat	Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.581.224,78	1.612.849,29	1.645.106,28	1.645.106,28
		Produksi perkebunan dan hortikultura	Ton	34.315,50	37.400,00	38.272,84	38.272,84
2	Ketahanan Pangan Meningkat	Capaian skor PPH Konsumsi	Indeks	90	91,80	92	92



B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.3 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Produksi tanaman Pangan, perkebunan, dan hortikultura meningkat	Penguatan kelembagaan petani dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian
			Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian
			Meningkatkan Perlindungan Tanaman dan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (DPI)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPP	Peningkatan koordinasi perencanaan pada internal DPP	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh Bidang bekerja sesuai SOP
	Ketahanan Pangan Meningkat	Peningkatan ketersediaan, akses, konsumsi dan keamanan pangan bagi masyarakat	Meningkatkan pemanfaatan pekarangan
			Meningkatkan ketersediaan, akses dan konsumsi pangan
			Meningkatkan koordinasi penanganan kerawanan pangan
			Meningkatkan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan
			Meningkatkan pengawasan keamanan pangan

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:



**Tabel II.4.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024**

Sasaran	Kebijakan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	359.746.500	414.491.500	54.745.000
Ketahanan Pangan Meningkat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	46.471.500	101.671.500	55.200.000
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	11.289.000	66.289.000	55.000.000
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	5.289.000	5.289.000	-
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	1.950.000	56.950.000	55.000.000
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	4.050.000	4.050.000	-
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	35.182.500	35.382.500	200.000
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2.350.000	2.350.000	-
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	32.832.500	33.032.500	200.000
Ketahanan Pangan Meningkat	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	4.740.000	4.740.000	-
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.740.000	4.740.000	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	4.740.000	4.740.000	-
Ketahanan Pangan Meningkat	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	8.535.000	8.535.000	-

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



Sasaran	Kebijakan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	8.535.000	8.535.000	-
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4.200.000	4.200.000	-
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4.335.000	4.335.000	-
Ketahanan Pangan Meningkat	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	300.000.000	299.545.000	(455.000)
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	300.000.000	299.545.000	(455.000)
	Pengembangan Lumbung Mataraman	300.000.000	299.545.000	(455.000)
Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Dan Hortikultura Meningkat	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.746.986.700	1.831.636.700	84.650.000
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.453.774.600	1.540.027.100	86.252.500
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	168.714.500	150.927.000	(17.787.500)
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.285.060.100	1.389.100.100	104.040.000
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	293.212.100	291.609.600	(1.602.500)
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	293.212.100	291.609.600	(1.602.500)
Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Dan Hortikultura Meningkat	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.558.375.400	4.589.535.400	31.160.000
	Pengembangan Prasarana Pertanian	258.375.400	273.175.400	14.800.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	227.165.400	241.965.400	14.800.000

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



Sasaran	Kebijakan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	31.210.000	31.210.000	-
	Pembangunan Prasarana Pertanian	4.300.000.000	4.316.360.000	16.360.000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	500.000.000	500.000.000	-
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.800.000.000	200.000.000	(3.600.000.000)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	3.616.360.000	3.616.360.000
Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Dan Hortikultura Meningkat	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	42.097.500	42.297.500	200.000
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	42.097.500	42.297.500	200.000
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	42.097.500	42.297.500	200.000
Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Dan Hortikultura Meningkat	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.526.674.300	1.491.634.300	(35.040.000)
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.526.674.300	1.491.634.300	(35.040.000)
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	315.500.000	315.500.000	-
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	251.424.500	235.664.500	(15.760.000)
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	959.749.800	940.469.800	(19.280.000)
		19.489.328.271	21.174.357.279	1.685.029.008

Sumber: DPA dan DPPA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023



**Tabel II.4.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian
Sasaran Tahun 2024**

Sasaran	Kebijakan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.129.581.771	20.759.865.779	1.630.284.008
Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.255.447.871	12.804.761.879	1.549.314.008
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.010.000	178.410.000	400.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	163.055.000	163.455.000	400.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	1.000.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.498.000	1.498.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.249.000	1.249.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	748.000	748.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.900.000	7.900.000	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.560.000	2.560.000	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.431.849.870	10.853.050.178	1.421.200.308
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.359.775.870	10.780.576.178	1.420.800.308
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.599.000	3.599.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	68.475.000	68.875.000	400.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.684.900	70.684.900	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	70.684.900	70.684.900	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.254.500	105.254.500	-

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



Sasaran	Kebijakan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.957.500	3.957.500	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.910.000	20.910.000	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.326.000	2.326.000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.060.000	5.060.000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	6.000.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.801.000	65.801.000	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.500.000	180.781.200	87.281.200
	Pengadaan Mebel	-	15.980.000	15.980.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.500.000	164.801.200	71.301.200
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.139.048.601	1.114.481.101	24.567.500
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000	1.700.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.136.748.601	1.112.181.101	24.567.500
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000	600.000	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.100.000	302.100.000	65.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	172.500.000	172.500.000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.100.000	5.100.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.500.000	118.500.000	65.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	6.000.000	-
		359.746.500	414.491.500	54.745.000

Sumber: DPA dan DPPA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	Ketahanan Pangan Meningkat	Capaian Skor PPH Konsumsi	indeks	90,00	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	90,00
2	Produksi Tanaman Pangan, perkebunan dan hortikultura meningkat-	Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.581.224,78	Triwulan I	470.221,49
					Triwulan II	89.941,69
					Triwulan III	998.406,78
					Triwulan IV	22.654,83
		Produksi Perkebunan dan Hortikultura	Ton	34.056,68	Triwulan I	8068,71
					Triwulan II	8082
					Triwulan III	8675,97
					Triwulan IV	9230

Pada tahun 2024, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perubahan dilakukan karena adanya realokasi anggaran dan



penambahan anggaran serta telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	Ketahanan Pangan Meningkat	Capaian Skor PPH Konsumsi	indeks	90,00	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	90,00
2	Produksi Tanaman Pangan, perkebunan dan hortikultura meningkat-	Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.581.224,78	Triwulan I	470.221,49
					Triwulan II	89.941,69
					Triwulan III	998.406,78
					Triwulan IV	22.654,83
		Produksi Perkebunan dan Hortikultura	Ton	34.315,50	Triwulan I	8198,12
					Triwulan II	8082
					Triwulan III	8805,38
					Triwulan IV	9230

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel II.7. Anggaran Tahun 2024

N0.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	101.671.500,00	DAU
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	4.740.000,00	DAU
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	8.535.000,00	DAU

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



NO.	Program	Anggaran	Keterangan
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	300.000.000,00	DAIS
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.831.636.700,00	DAU
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.589.535.400,00	DAU, DAK F DBH-CHT
7	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	42.297.500,00	DAU
8	Program Penyuluhan Pertanian	1.491.634.300,00	DAU, DAK F DAK NF
9	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.804.761.879,00	DAU
	JUMLAH	21.174.812.279,00	

Keterangan Tambahan:

1. DPPA-SKPD Nomor DPAA/A.6/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024 Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul semula Rp19.306.921.271,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp20.991.950.279,00 atau bertambah Rp1.685.029.008,00
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, Sub Kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman Rp299.545.000,00
4. Mengelola Dana Bagi Hasil cukai Hasil tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp241.965.400,00 melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana pendukung Pertanian Lainnya.
5. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp4.969.700.000,00 terdiri dari;
 - a. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan

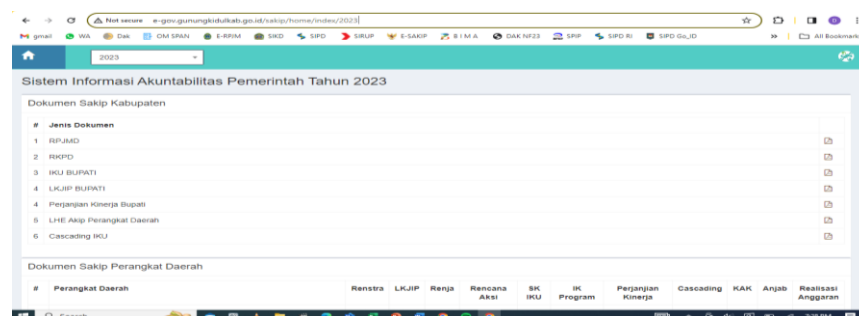


Pembangunan Rehabilitasi dan Jaringan Irigasi Usaha Tani
Rp3.610.000.000,00

- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
Rp475.000.000,00
 - c. Program Penyuluhan Pertanian, Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
Rp884.700.000,00
 - d. Dana penunjang DAK Fisik Rp230.300.000,00
6. Mengelola Dana Alokasi Non fisik sebesar Rp235.000.000,00 melalui Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 7. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga
 8. Tidak Mengelola anggaran dekonsentrasi.
 9. Tidak mengelola dana APBN Tugas Pembantuan

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi e-SAKIP (e-gov.gunungkidulkab.go.id)

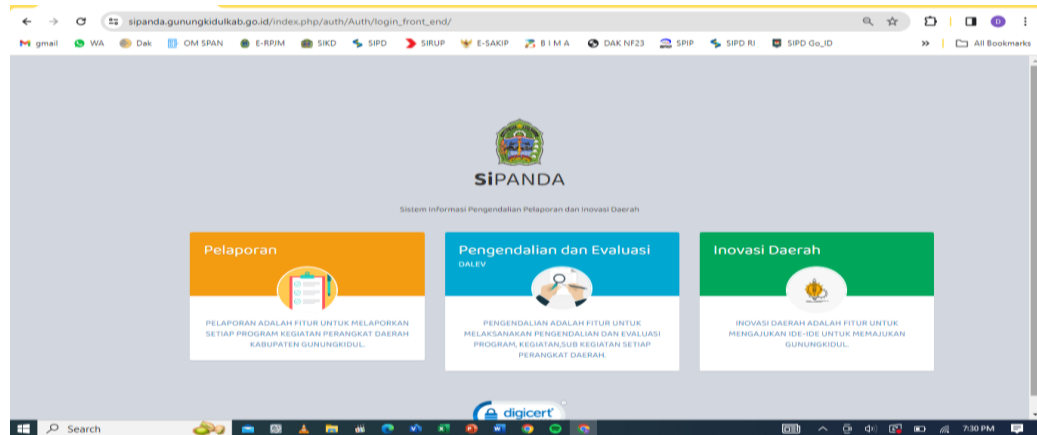


Sumber : <http://e-gov.gunungkidulkab.go.id/sakip/home/index/2023>

Gambar II.1. E-SAKIP



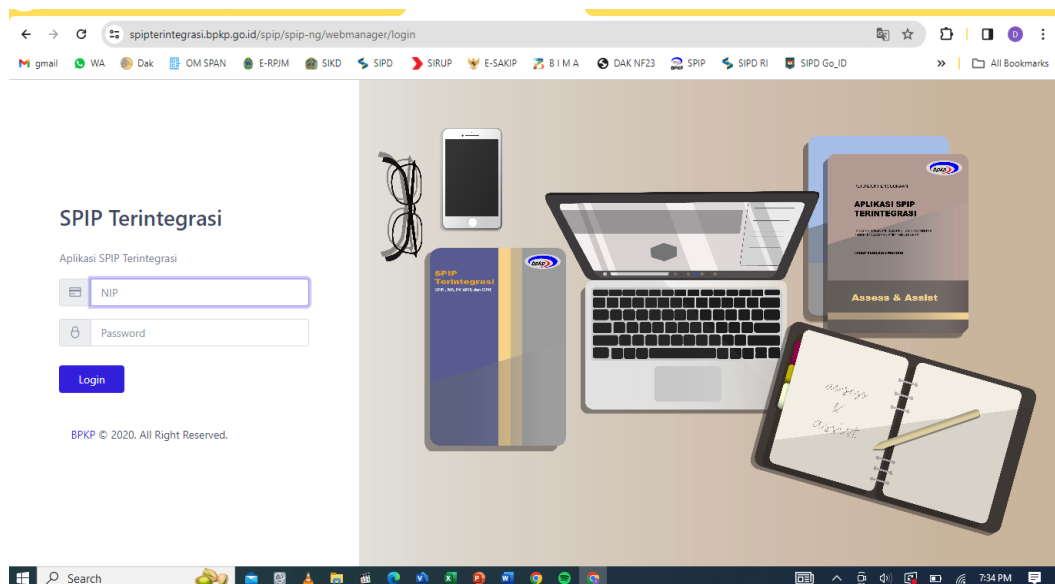
2. Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (sipanda)



Sumber : https://sipanda.gunungkidulkab.go.id/index.php/auth/Auth/login_front_end/

Gambar II.2. SIPANDA

3. Instrumen penilaian kemajuan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan secara mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi SPIP Terintegrasi yang mengintegrasikan data tindak lanjut hasil pengawasan.



Sumber : https://sipanda.gunungkidulkab.go.id/index.php/auth/Auth/login_front_end/

Gambar II.3. SPIP Terintegrasi



BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2024
- B. Realisasi Anggaran
- C. Inovasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator/ Meta Indikator	Satuan	Base Line 2021	Capaian 2023	Tahun 2024				Target Akhir Rpjmd
						Target	Realisasi	%	Kriteria / Kode	
1	Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Meningkatkan	Indikator: Produksi tanaman pangan Meta Indikator: Angka komulatif produksi laporan statistik tanaman pangan pada tahun ke n Yang dimaksud dengan tanaman pangan meliputi padi, jagung, kedelai dan ubi kayu	Ton	1490023,4	1516969,88	1581224,78	1.184.277,54	74,90	Sedang	1645106,28
		Indikator: Produksi perkebunan dan hortikultura Meta Indikator: Angka komulatif produksi laporan statistik perkebunan dan hortikultura pada tahun ke n Yang dimaksud dengan: tanaman Perkebunan :kakao, mete, tembakau, kelapa tanaman hortikultura meliputi cabe, bawang merah, pisang, alpukat dan durian								

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



No	Sasaran Strategis	Indikator/ Meta Indikator	Satuan	Base Line 2021	Capaian 2023	Tahun 2024				Target Akhir Rpjmd
						Target	Realisasi	%	Kriteria / Kode	
2	Ketahanan Pangan Meningkat	Indikator: Capaian Skor PPH Konsumsi Meta Indikator: Jumlah angka yang dicapai dalam keragaman konsumsi kelompok pangan (%AKG x bobot masing-masing kelompok pangan)	Indeks	89,7	93,01	90	91,40	101,56	Sangat Tinggi	92

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan Meningkat

Kinerja sasaran Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Meningkat diukur dengan indikator Produksi Tanaman Pangan dan Produksi Perkebunan dan Hortikultura. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Meningkat	Produksi Tanaman Pangan	Angka kumulatif produksi laporan statistik tanaman pangan.tahun ke n Yang dimaksud dengan tanaman pangan meliputi padi, jagung, kedelai dan ubi kayu
		Produksi Perkebunan dan Hortikultura	Angka kumulatif produksi laporan statistik perkebunan dan hortikultura pada tahun ke n Yang dimaksud dengan: tanaman perkebunan meliputi kakao, mete, tembakau, kelapa tanaman hortikultura meliputi cabe, bawang merah, pisang, alpukat dan durian

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.4 berikut:



Tabel III.4 Capaian Sasaran Produksi Tanaman Pangan,
Perkebunan dan Hortikultura Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2024			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Meningkat	Produksi Tanaman Pangan	1.581.224,78	1.184.277,54	74,90	Sedang
	Produksi Perkebunan dan Hortikultura	34.315,50	37.303,13	108,71	Sangat Tinggi

Dari dua indikator kinerja utama, menghasilkan 1 indikator kinerja dengan capaian kategori sangat tinggi pada produksi perkebunan dan hortikultura (108,71%) dan 1 indikator kinerja dengan capaian kategori sedang ($66 \leq 75$) pada produksi tanaman pangan (74,90%). Sasaran pertama produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan yang mempunyai nilai sangat tinggi pada indikator capaian produksi perkebunan dan hortikultura dengan realisasi sebesar 37.303,13 ton dari target 34.315,50 ton. Capaian produksi tanaman pangan sedang pada angka 1.184.277,54 ton dari target sebesar 1.581.224,78 ton.

Capaian realisasi untuk produksi tanaman pangan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 bila dibandingkan dengan target Kabupaten Gunungkidul dan target Pemda DI Yogyakarta, pada komoditas padi, realisasi sebesar 269.841 ton yang berarti dibawah target Kabupaten Gunungkidul (297.276,62 ton) tetapi masih di atas target Pemda DI Yogyakarta (219.743,70 ton). Untuk komoditas jagung dengan realisasi 287.879,86 ton, berarti bahwa sudah memenuhi target baik target Kabupaten Gunungkidul (255.636,46 ton) dan target Pemda DI Yogyakarta (273.430,35 ton). Pada komoditas kedelai realisasi sebesar 891,12 ton capaian dibawah target Kabupaten Gunungkidul (6.001,20 ton)



dan target Pemda DI Yogyakarta (5.507,4 ton). Sedangkan untuk komoditas ubi kayu, dengan realisasi 625.665,12 ton menunjukkan bahwa realisasi belum mencapai target Kabupaten Gunungkidul di angka 948.108,79 ton begitu juga untuk target Pemda DI Yogyakarta (848.647 ton) belum tercapai.

Capaian realisasi untuk produksi tanaman perkebunan pada komoditas kelapa dengan realisasi sebesar 5.360,39 ton yang berarti capaian dibawah target Kabupaten Gunungkidul (5.696 ton) dan target Pemda DI Yogyakarta (7.455,42 ton). Untuk komoditas kakao dengan realisasi 377,76 ton, berarti juga masih dibawah target baik target Kabupaten Gunungkidul (418 ton) dan target Pemda DI Yogyakarta (420,61 ton). Mete realisasi sebesar 352,37 ton yang masih dibawah target Kabupaten Gunungkidul 662 ton. Begitu juga untuk komoditas tembakau dengan target sebesar 306 ton terealisasi 24,72 ton jauh dibawah target.

Capaian realisasi untuk produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 bila dibandingkan dengan target Kabupaten Gunungkidul dan target Pemda DI Yogyakarta, pada komoditas bawang merah, realisasi sebesar 5.047,29 ton yang berarti bahwa sudah berada di atas target Kabupaten Gunungkidul (7.140 kw) dan target Pemda DI Yogyakarta (468,2 kw). Untuk komoditas cabe dengan realisasi 84.674 kw, berarti bahwa sudah memenuhi target baik target Kabupaten Gunungkidul (6.120 kw) dan target Pemda DI Yogyakarta (200,31 kw). Pada komoditas pisang realisasi sebesar 215.698,41 kw berada di bawah target Kabupaten Gunungkidul (254.890 kw) tetapi diatas target Pemda DI Yogyakarta (75.468,6 kw). Untuk komoditas alpukat dengan realisasi 7.585,54 kw berada di atas target Kabupaten Gunungkidul (849,10 kw) dan target Pemda DI Yogyakarta (2747,3 kw). Sedangkan untuk komoditas durian, dengan realisasi 2.171,73 kw menunjukkan bahwa realisasi belum mencapai target Pemda



Di Yogyakarta di angka 4814,4 kw tetapi untuk target Kabupaten Gunungkidul (747,7 kw) sudah melampaui.

Realisasi kinerja tanaman pangan 1.184.277,54 ton pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan pada 2023. Sedangkan pada tanaman perkebunan dan hortikultura realisasi di tahun 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2023. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 2022 dan 2023 dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2024 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024		
Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Meningkat	Produksi Tanaman Pangan	1.585.700,01	1.516.969,88	1.184.277,54	1.645.106,28	71,99
	Produksi Perkebunan dan Hortikultura	24.814,92	40.314,73	37.303,13	38.272,84	97,47

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa untuk produksi tanaman pangan, capaian dari tahun 2022-2024 masih fluktuatif, dimana dibandingkan tahun 2023, capaian untuk produksi tanaman pangan yang terdiri dari padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai dan ubi kayu ada penurunan produksi dari 1.516.969,88 ton di tahun 2023 menjadi 1.184.277,54 ton pada tahun 2024 atau selisih -39.647,24 ton. Dari data produksi padi di Gunungkidul tahun 2024 ada penurunan dibanding produksi padi tahun 2023 dikarenakan ada dampak perubahan iklim yaitu fenomena El Nino atau kekeringan di 2024. Kondisi el nino 2024 ditandai



hujan terlambat dan berakhir lebih cepat atau kekeringan sehingga produksi padi tidak optimal. Meski demikian jumlah produksi padi ini jika dikonversi ke beras masih melebihi kebutuhan beras penduduk Gunungkidul atau tetap masih surplus dibanding kebutuhan berasnya. Harapannya tahun 2025 dengan curah hujan yang bagus dapat memberikan produksi padi optimal sehingga produksi padi setara tahun-tahun sebelumnya berkisar di angka 300.000 ton GKG setahunnya. Sedangkan produksi jagung meningkat di tahun 2024 dibanding tahun 2023. Hal ini antara lain karena dampak el nino hujan terlambat datang menyebabkan petani beralih dari menanam padi ke menanam jagung sehingga luas tanam jagung bertambah.

Pencapaian target sasaran Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Meningkat didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan indikator Produksi komoditas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan indikator Persentase prasarana pertanian yang digunakan
3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan indikator persentase bencana pertanian yang tertangani
4. Program Penyuluhan Pertanian dengan indikator Kelompok tani yang melakukan pola usaha agribis

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indicator serta Capaian kinerja program pada Sasaran Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Meningkat disajikan pada tabel III.6 dan Tabel III.7 dibawah ini.



Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Meningkat	1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan	Jumlah produktivitas Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu), Tanaman Hortikultura (cabe, bawang merah, mangga, durian, pisang), Tanaman Perkebunan (kakao, mete, tembakau, kelapa) dan buah (pisang, alpukat, durian)
		2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang digunakan	(Jumlah prasarana yang aktif digunakan/ Jumlah prasarana yang dibangun (sejak tahun 2017 dari APBD) x 100%
		3	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	persentase bencana pertanian yang tertangani	(Jumlah bencana pertanian /jumlah bencana pertanian yang tertangani) x 100%
		4	Program Penyuluhan Pertanian	Kelompok tani yang melakukan pola usaha agribis	Jumlah Kelompok Tani kelas utama tahun ke n

Tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%) Kategor
Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura /Tanaman Perkebunan Meningkat	Produksi Tanaman Pangan	74,90	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan (ton)	1.615.540,28	1.221.580,67	74,90 (Sedang)

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%) Kategor
	Produksi Perkebunan dan Hortikultura	108,71	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang digunakan	100	100	91,80 Sangat Tinggi
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	persentase bencana pertanian yang tertangani	100	100	100 Sangat Tinggi
			Program Penyuluhan Pertanian	Kelompok tani yang melakukan pola usaha agribis (poktan)	120	120	100 Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Program					100	93,73	97,95 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan sebesar 91,80%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Meningkatkan tersebut sangat dipengaruhi oleh capaian produksi tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, penanganan OPT, sarana prasarana pertanian dan kualitas sumber daya petani dan penyuluh. Penjabaran indikator kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul meliputi:

Indikator Kinerja Produksi Tanaman Pangan

Komoditas strategis pertanian merupakan komoditas pertanian yang bernilai ekonomi cukup tinggi untuk menjaga ketahanan pangan (stabilitas harga) agar tidak terjadi inflasi. Komoditas strategis dari tanaman pangan yang juga menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Gunungkidul diantaranya padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu.



Bila dilihat dari tabel III.8, produksi padi antara tahun 2020-2024 menurun rata-rata -10,90% per tahun. Dari tabel juga terlihat bahwa ada peningkatan luas tanam tahun 2024 sebesar 51.039 ha dibandingkan tahun 2023. Peningkatan luas tanam terjadi karena dalam 1 tahun ada 2 kali penanaman besar. Dimana MT 1 yang dijadwal akhir tahun 2023 (bulan oktober-november), pelaksanaannya mundur di bulan Januari 2024. Sehingga tahun 2024 ada 2 kali penanaman yaitu bulan Januari 2024 (panen bulan April 2024) dan bulan Oktober 2024 (MH 1 normal, panen bulan Februari 2025). Pelaksanaan budidaya padi pada lahan yang sudah ada, antara lain dengan penggunaan bibit unggul, pemberian pupuk yang tepat serta pemberian air irigasi yang efektif dan efisien.

Tabel III.8 Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam, Luas panen ,
Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2020-2024

No	Kriteria	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Luas Tanam	58.933	56.647	57.190	29.533	80.572,06	14,85
2	Luas Panen	54.948	56.624	56.695	56.266	54.374,41	-3,35
3	Produksi	290.619	301.161	301.356	306.415	269.841,44	-10,90
4	Produktivitas	52,89	53,19	53,15	54,46	49,63	-7,20

Komoditas padi capaian target produksinya didukung oleh padi sawah dan padi ladang. Produktivitas dari padi ladang banyak ditentukan oleh intensitas curah hujan. Sepanjang Tahun 2024 hari hujan rata-rata sebesar 9 hari dengan curah hujan rata-rata sebesar 160.99 mm. Penurunan produksi dipengaruhi karena Musim tanam I pada bulan Oktober-November 2023 hampir semua kapanewon mempunyai rata-rata curah hujan sangat rendah 80.93 mm. Sehingga selama tahun 2024 penanaman padi tidak dilaksanakan seperti biasanya sehingga produksi gabah menurun dan tidak mencapai target yang ditetapkan.

Dalam rangka mengamankan areal tanaman dari gangguan OPT, telah dilaksanakan kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT), Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI), gerakan



pengendalian OPT, dan penguatan perlindungan tanaman pangan. Pelatihan Agensia Hayati tahun 2024 dilaksanakan di KT Sido Makmur, Monggol, Saptosari. Dalam pelatihan Agensia Hayati peserta akan dilatih membuat PGPR (*Plant Growth Promoting Rhizobacteria*), Trichoderma, pembuatan pupuk organik padat dan cair yang semuanya merupakan bahan yang mudah didapat di alam sekitar. Pengembangan dan pemanfaatan Agens Hayati merupakan salah satu upaya terlaksananya pengendalian yang ramah lingkungan. Karena Pemakaian pupuk kimia yang berlebihan dan tidak berimbang serta pestisida sintetik yang tidak terkendali dalam jangka lama akan berakibat buruk terhadap lingkungan, tanah dan tanaman.

Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) juga disesuaikan dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh POPT dan Dinas Pertanian dan Pangan, apabila di lapangan ditemukan spot serangan OPT yang dinilai membahayakan dan perlu di kendalikan maka segera dilakukan Gerakan Pengendalian secara serentak. Bahan pengendalian dengan menggunakan agensia hayati. Agensia Hayati ini bisa berasal dari golongan jamur, bakteri, virus ataupun protozoa. Agensia yang sering digunakan dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah *Tricoderma*, *Beauveria bassiana* dan *painni*. Pengendalian OPT secara hayati merupakan salah satu komponen dalam pengendalian hama secara terpadu (PHT) dimana pengendalian secara hayati diharapkan terjadi keseimbangan dalam ekosistem sehingga keberadaan OPT tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis.

Tahun 2024, Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT tanaman perkebunan dilaksanakan di 2



lokasi, yaitu di Kelompok tani Meteor Cemerlang, Semuluh, Semanu dan Kelompok tani Tani Maju, Badongan, Karang Sari, Semin. Sedangkan untuk tanaman hortikultura dilaksanakan di Kelompok tani Hangudi Rejeki,



Jaranmati I, Karangmojo ; Kelompok tani Sumber Rejeki, Ngasem utara, Plembutan, Playen. (komoditas cabe) dan Kelompok tani Sarwo Akur, Puleireng, Sidoharjo, Tepus; Kelompok tani Sumber Mulyo, Blimbing, Karangrejek, Wonosari (komoditas bawang merah).



Selama Tahun 2024 tercatat LTS (Luas Tambah Serangan) pada komoditas aneka cabai 323,76 ha; bawang merah 13,45 ha; buah kelengkeng 0,02 ha; manga 6,05 ha; dan pisang 20,8 ha.

Prasarana dan sarana memiliki peranan yang penting sebagai penggerak dan pengembangan pertanian. Komponen prasarana dan sarana yang meliputi lahan, air/irigasi, benih/bibit, pupuk, pestisida, alsintan dan pembiayaan merupakan elemen penting dalam proses produksi. Penggunaan alsintan oleh petani telah mempercepat waktu olah tanam, tanam, panen dan pasca panen, meningkatkan efisiensi biaya serta mengurangi kehilangan hasil (*losses*).

Strategi operasional peningkatan produksi tanaman pangan ditempuh melalui dua strategi utama:

- a. Perluasan Areal Tanam yang dilakukan melalui upaya: peningkatan indeks pertanaman (IP) pada lahan eksisting melalui optimalisasi lahan, perbaikan jaringan irigasi dan pompanisasi, pencetakan lahan baru/cetak sawah, pemanfaatan lahan terlantar, dan penanaman tumpang sari di lahan perkebunan dan kehutanan.
- b. Peningkatan Produktivitas dilakukan melalui upaya: peningkatan penggunaan benih unggul bermutu, perbaikan pengelolaan tanaman terpadu (PTT), pengamanan tanaman dari gangguan OPT dan DPI (banjir dan kekeringan), serta penguatan penanganan panen dan Pascapanen.

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas produksi padi, diantaranya dengan : 1) pengadaan obat-obatan/pestisida untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit tanaman, 2)



Penggunaan benih unggul dan pengelolaan budidaya tanaman yang baik, 3) Adanya pelatihan dan bintek bagi petani untuk meningkatkan budidaya yang baik, 4) Peningkatan sarana irigasi pertanian, 5) Fasilitas PSP, 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Usaha Pertanian (DAK Pertanian) dan 7) Fasilitas verifikasi LP2B.

Penanganan pascapanen padi juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil dan penurunan susut hasil. Pada tahun 2024 disalurkan bantuan alat pertanian seperti traktor, cultivator, power thresher, dan sarana irigasi pertanian baik dana APBD, APBN ataupun dana APBD Provinsi.

Budidaya jagung tahun 2024 dengan luas areal tanam 80.314 ha yang berarti bahwa ada rata-rata peningkatan sebesar 52.329 ha di banding tahun 2023.. Pada Tabel III.9 juga dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan untuk produksi jagung sebesar 4,13 ton. Walaupun luas panen menurun sebesar - 1.817 ha tidak mempengaruhi produksi, karena kualitas benih yang ditanam bagus sehingga produktivitas jagung meningkat 4,33 ton/ha.

Tabel III.9 Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung Tahun 2020-2023

No	Kriteria	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Luas Tanam	55.101	55.934	56.107	55.209	80.314	15,72
2	Luas Panen	52.946	55.059	55.082	54.615	52.367	-4,06
3	Produksi	274.391	275.913	275.913	276.589	287.880	4,31
4	Produktivitas	51,82	50,11	50,09	50,64	54,97	8,11



Luas areal tanam jagung 80.314 ha lebih tinggi dari tahun 2023 (55.209 ha) disebabkan karena dampak el nino dimana hujan terlambat datang menyebabkan petani beralih dari menanam padi ke menanam jagung sehingga luas tanam jagung bertambah.



Kegiatan penguatan perlindungan tanaman jagung juga dilakukan dengan gerakan pengendalian OPT. Penanganan pascapanen jagung juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil dan penurunan susut. Pada tahun 2024 disalurkan bantuan sarana untuk mendukung pengembangan komoditas tanaman jagung berupa corn sheller 51 unit dari dana APBN dan 3 unit dari APBD Provinsi.

Produksi kedelai pada tabel III.10 walaupun luas panen tahun 2024 berkurang -2.898 ha dibandingkan tahun 2023, tetapi produktivitas meningkat karena dipengaruhi oleh kualitas benih dan pemupukan yang baik.

Tabel III.10 Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam, Luas Panen , Produksi dan Produktivitas Kedelai Tahun 2020-2024

No	Kriteria	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Luas Tanam	3.392	4.067	3.392	4.067	694	-571,33
2	Luas Panen	3.775	3.544	3.775	3.544	647	-449,31
3	Produksi	4.722	4.394	4.722	4.394	891	-394,32
4	Produktivitas	12,51	12,40	12,51	12,40	13,78	9,84

Rekomendasi sebagai rencana aksi tindak lanjut perbaikan kinerja peningkatan produksi kedelai yang ditawarkan tahun yang akan datang antara lain: mengalokasikan bantuan saprodi budidaya kedelai, peningkatan perlindungan dari serangan OPT, peningkatan fasilitasi sarana pasca panen kedelai serta penguatan agroekosistem oleh para penyuluh dan diharapkan petani melakukan monitoring dan evaluasi pertanaman sejak dini guna mengantisipasi gangguan dan kerusakan akibat hama dan penyakit serta perbaikan penanganan pascapanen.

Penurunan produksi dari ubi kayu dengan melihat tabel III.11 terlihat pada luas panen. Tahun 2024 dengan rata-rata tingkat curah hujan menengah 160,99 mm (antara 100-300 mm) juga mempengaruhi jumlah kadar pati dalam ubi kayu, sehingga tidak tercapai berat maksimal. Rata-rata pertumbuhan produksi ubi kayu dari tahun ke tahun tercatat cenderung menurun dalam 5



tahun terakhir (-39,13%). Produksi ubi kayu tahun 2024 menurun -301.494 ton bila dibandingkan tahun 2023 (927.159 ton) dengan capaian ada di 625.665 ton. Konsumsi ubi kayu dibedakan dalam bentuk konsumsi langsung sebagai bahan makanan dan dalam bentuk pakan dan diolah untuk makanan. Konsumsi ubi kayu yang diolah menjadi makanan semakin lama mempunyai pasar yang besar dan mempunyai porsi yang hampir mendekati konsumsi sebagai pakan, hal ini menunjukkan bahwa industri pengolahan ubi kayu semakin berkembang

Tabel III.11 Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam, Luas panen , Produksi dan Produktivitas Ubi Kayu Tahun 2020-2024

No	Kriteria	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Luas Tanam	44.025	43.088	43.088	33.474	67.246	27,38
2	Luas Panen	43.855	43.088	44.024	43.654	42.653	-1,45
3	Produksi	1.001.629	829.556	1.003.237	927.159	625.665	-39,13
4	Produktivitas	228,40	192,53	188,00	212,39	146,69	-38,09

Gunungkidul yang didominasi lahan kering, salah satu komoditas dominan adalah tanaman ubi kayu. Komoditas ubi kayu biasanya ditanam bersamaan dengan padi di musim pertama, sekitar bulan Oktober ketika musim hujan datang. Ubi kayu ditanam secara tumpangsari dengan padi dan palawija lainnya. Bulan Juli 2024 sebagian besar petani singkong atau ubi kayu di Kabupaten Gunungkidul memasuki masa panen dan akan panen raya seluruhnya di Agustus 2024. sebagian besar singkong ini diproduksi untuk pemenuhan industri gaplek hingga di jual ubi basah singkong dari lahan. Sehingga harapannya bisa menjadi tambahan pendapatan petani

Ubikayu merupakan salah satu bahan pangan pengganti beras yang cukup penting peranannya dalam menopang ketahanan pangan suatu wilayah. Sesuai dengan simbol daerah Kabupaten Gunungkidul terdapat lambang tanaman ubi kayu, yang menjelaskan bahwa sebagian besar lahan di kabupaten Gunungkidul memproduksi ubi kayu. Hal ini dikarenakan



peranan ubikayu sebagai sumber bahan pangan pengganti bahan pangan utama yaitu beras. Meskipun masih banyak kendala yang dihadapi dalam merubah pola konsumsi masyarakat yang sudah terbentuk selama ini, namun demi keamanan pangan suatu wilayah perlu kiranya sosialisasi diversifikasi pangan berbahan ubikayu atau singkong sebagai bahan pangan alternatif selain beras atau jagung.



Upaya untuk peningkatan produktifitas ubi kayu sebagai upaya tindak lanjut diantaranya dengan penggunaan benih unggul, ubikayu diusahakan secara tumpang sari dengan komoditas lain, umur panen ubi kayu tergantung harga pasar jika harga murah maka umur panen panjang, pemanenan menunggu harga tinggi. Konsumsi ubi kayu dibedakan dalam bentuk konsumsi langsung sebagai bahan makanan dan dalam bentuk pakan dan diolah untuk makanan. Konsumsi ubi kayu yang diolah menjadi makanan semakin lama mempunyai pasar yang besar dan mempunyai porsi yang hampir mendekati konsumsi sebagai pakan, hal ini menunjukkan bahwa industri pengolahan ubi kayu semakin berkembang.

Indikator Kinerja Produksi Perkebunan dan Hortikultura

Kabupaten Gunungkidul dalam pengembangan kawasan perkebunan dan hortikultura berfokus pada komoditas (prioritas nasional dan andalan daerah), fokus lokasi (sesuai arah pengembangan wilayah dan memperhatikan *agro-ecological zone*) dan fokus dalam sistem agribisnis (mencakup seluruh subsistem hulu, on-farm, hilir dan penunjang) dengan basis korporasi petani. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/Rc.040/6/2018 Tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional telah menetapkan Kabupaten Gunungkidul untuk Perkebunan dan Hortikultura sebagai kawasan untuk komoditas aneka cabai (cabai rawit dan cabai besar), bawang merah, mangga, pisang, durian, mete,



kakao dan kelapa untuk pengembangan dan perluasan kawasan serta pengembangan komoditas sesuai dengan potensi wilayah.

Indikator produksi tanaman perkebunan dan hortikultura didukung komoditas tanaman perkebunan yang terdiri dari kakao, mete, tembakau dan kelapa, sedangkan untuk komoditas hortikultura terdiri dari bawang merah, cabe, pisang, alpukat dan durian yang juga menjadi Indikator Kinerja Utaman Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2024.

Capaian indikator dari hasil evaluasi data pada tabel III.4 terlihat bahwa capaian kinerja untuk indikator produksi tanaman perkebunan dan hortikultura sebesar rata-rata 108,71% yang masuk kategori sangat tinggi. Sasaran pertama tingkat produksi tanaman perkebunan dan hortikultura menunjukkan meningkat sebesar 2.987,63 ton dari realisasi tahun 2023 sebesar 34.315,50 ton menjadi 37.303,13 ton di tahun 2024. Komoditas perkebunan realisasi di tahun 2024 untuk komoditas tembakau, kakao dan mete mengalami peningkatan jumlah produksi (Tabel III.12). Hanya komoditas kelapa yang mengalami penurunan produksi 1.570 ton dari hasil kelapa di tahun 2023 sebesar 27.724.777 butir menurun menjasi 21.441.579 butir di tahun 2024.

Meningkatnya produksi pada komoditas perkebunan antara lain disebabkan oleh adanya harga yang menarik, jaminan harga dan kepastian pasar sehingga mendorong petani memelihara tanamannya dengan baik. Selain itu peningkatan produksi dipengaruhi oleh meningkatnya luas areal tanam, penggunaan bibit/ benih bervariasi unggul, adanya intervensi pemerintah melalui kegiatan rehabilitasi, perluasan areal, pemberdayaan petani, pemeliharaan kebun induk, fasilitasi bibit/benih unggul, dan penanganan pascapanen, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Jambu mete merupakan tanaman yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, harganya cukup stabil dan prospek pasarnya baik. Penyebab fluktuasi produksi jambu mete disebabkan oleh ketidakterpaduan



dan tidak adanya pola sinergisme dalam pengelolaan tanaman dan lahan serta keberadaan dan kinerja usahatani tidak didukung oleh keberadaan dan kinerja usaha-usaha terkait, baik di segmen rantai hulu yakni bidang usaha pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana usahatani; atau di segmen rantai hilir, yakni bidang usaha pengolahan dan pemasaran hasil usahatani; maupun di segmen rantai sisi, yakni bidang usaha jasa fasilitator, misalnya usaha pembiayaan dan infrastruktur penunjang.

Peningkatan produksi ini tidak terpengaruh oleh penurunan luas tanam sebesar -482 ha dari luas tanam tahun 2023 seluas 5.489,69 ha menjadi 5.007,46 ha di tahun 2024. Capaian produksi 2024 ada pada angka 22,56 ton yang berarti ada peningkatan sebesar 21.52 ton. Kegiatan intensifikasi mete dengan penambahah pupuk NPK dan pupuk perangsang buah menjadi salah satu faktor peningkatan produksi walau dengan kondisi penurunan areal tanam.

**Tabel III.12 Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam dan Produksi
Mete Tahun 2020-2024**

No	Kriteria	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuh an (%)
1	Luas Tanam	2.642,60	5.833,00	5.544,90	5.489,69	5.007,46	14,62
2	Produksi	93,95	0,27	0,27	1,04	22,56	352,37

Upaya-upaya yang ditempuh dalam pengembangan komoditas unggulan melalui peningkatan produksi dan produktivitas dengan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan, pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pasca panen, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian pelayanan berkualitas.



Tahun 2024 produksi kakao mencapai 377,76 ton yang berarti meningkat sebesar 328,97 ton bila dibanding total produksi tahun 2023 (48,80 ton). Peningkatan produksi diawali dengan adanya peremajaan tanaman kakao di tahun 2023 dimana hampir diseluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul petani kakao melakukan kegiatan mengganti pohon yang telah berumur 30 tahun lebih, di dukung dengan program APBN untuk 100 ha peremajaan sentra kakao di Kapanewon Ponjong, Patuk dan Semanu. Program intensifikasi kakao untuk peningkatan produksi juga dilakukan dengan penambahan metabolisme sekunder untuk mencegah hama VSD yang



menyebabkan kanker batang kakao.

Pemilihan dan penggunaan bahan tanam kakao unggul perlu diikuti dengan tindakan kultur teknis yang baik, antara lain meliputi pembibitan, perawatan tanaman di lapangan, dan penanganan pascapanennya sehingga usaha budidaya kakao membawa hasil yang optimal dan memuaskan.

Pemberdayaan petani merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas kakao, melihat hal itu perlu adanya upaya yang harus dilakukan guna memajukan kesejahteraan petani agar kedepannya produk-produk unggulan (kakao) yang dihasilkan mendapatkan harga yang layak. Selain itu perlu adanya kelembagaan yang mendukung upaya tersebut agar petani tidak dirugikan dengan harga biji kakao yang fluktuatif.

Pohon kelapa termasuk tanaman perkebunan ataupun tanaman industri. Ciri khas tanaman kelapa memiliki batang lurus dan tidak bercabang. Pohon kelapa itu tergolong tanaman keluarga palmae. kelapa juga menjadi tanaman dominan di beberapa perdesaan, seperti di Desa Banyusoca Playen,



Desa Pilangrejo Nglipar, juga di persawahan Ponjong. Tak heran apabila di desa tersebut muncul home industri pengolahan gula kelapa.



Fluktuasi produksi kelapa dipengaruhi dari luas areal kelapa yang berkurang/bertambah atau dari jumlah tanaman yang menghasilkan. Pengembangan kawasan kelapa yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa di tahun-tahun mendatang. Kegiatan untuk meningkatkan produksi kelapa antara lain: Peremajaan Tanaman Kelapa, pendampingan, dan pengawalan, pelatihan penumbuhan kelompok petani kelapa, serta pemberdayaan kelembagaan. Realisasi produksi kelapa tahun 2023 sebesar 23.103,98 ton yang merupakan konversi dari kelapa yang dihasilkan sebanyak 27.724.777 butir kelapa.

Tabel III.13 Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam dan Produksi Kelapa Tahun 2020-2024

No	Kriteria	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Luas Tanam	5.278,36	8.068,65	7.758,53	9.718,46	9.375,69	30,98
2	Produksi	27.384.593,00	40.465.870,40	32.372.696,32	27.724.776,68	21.441.579,67	-51,72

Menjadi kawasan yang obyek wisata khususnya pantai tentu kunjungan wisatawannya pun terus membludak. Kondisi ini kemudian berpengaruh pada tingkat permintaan kelapa muda. Sayangnya saat ini, ketersediaan kelapa muda sering kali tidak memenuhi permintaan pasar. Sehingga pedagang harus mengambil kelapa dari daerah luar. Selain itu juga diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan dan ekonomi



wilayah. Pengembangan kelapa dengan metode berkelanjutan akan menurunkan kerusakan lahan dan pengoptimalkan pemanfaatan lahan kosong. Di sisi lain, jika masyarakat mampu mengolah potensi yang dimiliki tentu nilai jualnya pun lebih tinggi.

Tanaman tembakau di Kabupaten Gunungkidul tersebar di Kapanewon Panggang, Purwosari, Karangmojo dan Ngawen. Kapanewon Purwosari merupakan lokasi sentra terutama di Kalurahan Giritirto dan Giriasih. Selama tahun 2024 luas area tembakau meningkat 137,35 ha dibandingkan tahun 2023 (18,50 ha). Walaupun rata-rata pertumbuhan luas tanam tembakau menurun -27,22 ha tapi produksi di tahun 2024 meningkat. Hal ini disebabkan karena hasil produksi tembakau 2024 merupakan hasil penanaman di tahun 2023 dimana pada tahun 2023 di akhir tahun curah hujan



rendah dengan rata-rata 74,4 mm sehingga tembakau dapat tumbuh dengan baik dan produksi daun basah meningkat. Tanaman tembakau juga merupakan tanaman yang tidak disukai monyet sehingga aman dari serangan monyet.

Kendala yang dihadapi petani tembakau pada umumnya masalah penyiraman, termasuk masalah pengeringan. Soal harga di tingkat petani, tahun 2023 mencapai Rp100.000,00 hingga Rp300.000,00 tergantung varietas. Terkait pemasaran, tembakau dijual di pasar lokal, pengepul dan pedagang di wilayah Bantul. Tidak sedikit masyarakat yang memasarkan secara online yang mengarah ke pasar luar daerah.

Produksi hortikultura tahun 2024 yang masuk indikator ini terdiri dari bawang merah dan cabe, serta komoditas buah-buahan yang terdiri dari pisang, alpukat dan durian. Capaian kinerja produksi hortikultura pada bawang merah menurun pada tahun 2024 (5.047,29 kw) sebesar -9.655 kw dari tahun 2023 sebesar 14.701,80 kw. Penurunan produksi dari bawang merah ini juga



di tandai dengan penurunan luas panen sebesar -41 ha di tahun 2024. Harga bibit bawang merah yang cenderung naik menyebabkan petani beralih ke tanaman hortikultura lainnya seperti cabe. Sealin itu di beberapa sentra bawang merah



seperti di Karangrejek, Wonosari mengalami serangan OPT jenis moler moler (*fusarium oxysporum*). embun tepung (*peronospora*), lalat *lyriomiza*, dan ulat *spodoptera exygua*. menyebabkan penurunan hasil pada kualitas umbi (umbi mudah busuk, berair dan bau). Curah hujan yang tinggi menambah kelembaban sehingga populasi jamur dan bakteri menyerang umbi bawang merah.

Tabel III.14 Rata-rata Pertumbuhan Luas Panen dan Produksi
Bawang Merah Tahun 2020-2024

No	Kriteria	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuh an (%)
1	Luas Panen	96,76	85,28	121,87	155,30	113,81	30,91
2	Produksi	760,10	18.037,42	3.485,00	14.701,80	5.047,29	618,16

Tahun 2024, ada dukungan dana Bank Indonesia untuk KT Ngudi Makmur Klayar, Kedungpoh Nglipar dalam bentuk CSR yang direncanakan selama 3 tahun (2024-2026). Dinas Pertanian dan Pangan selaku Pembina kelompok merekomendasikan kelompok dalam mencapai dukungan dana.

Pemasaran bawang merah sudah yang bekerjasama dengan asosiasi bawang merah Brebes, karena bawang merah asli Gunungkidul mempunyai ciri lebih tahan lama tidak mudah busuk karena perlakuan saat penanaman hanya menggunakan sedikit pupuk urea(kimia) dan lebih ke pupuk organik.



Kampung sayuran dari dana APBN untuk komoditas bawang merah dilakukan seluas 10 ha dengan varietas Tajuk (umbi) di Kapanewon Wonosari.

Realisasi produksi cabe tahun 2024 sebesar 84.674 kw meningkat jauh bila dibandingkan tahun 2023 sebesar 62.033 kw. Peningkatan produksi cabai juga disukung peningkatan luas tanam 23 ha di tahun 2024. Model dengan tanam sisip pada tanaman cabe memberikan dampak cabe dapat dipanen kontinue 12-15 kali dalam setahun.

Tabel III.15 Rata-rata Pertumbuhan Luas Panen dan Produksi
Cabe Tahun 2020-2024

No	Kriteria	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuh an (%)
1	Luas Panen	200,84	187,28	262,57	327,91	351,03	69,99
2	Produksi	585,60	5.723,88	4.611,96	22.641,50	84.674	664,12

Seperti halnya pada komoditas bawang merah, KT Amrih Murakapi Ngasem Selatan Plembutan Playen juga menerima CSR dari Bank Indonesia yang telah dimulai tahun 2023-2025 untuk dukungan bibit, pupuk dan pestisida. Pemasaran cabe dilaksanakan dengan pasar lelang yang mulai tahun 2023 difasilitasi Kementrian Pertanian berupa sarana alat di pasar lelang seperti timbangan yang sudah di distribusikan ke Ngasem Selatan dan Utara Plembutan Playen.

Sedangkan untuk komoditas hortikultura pada buah-buahan realisasi tahun 2024, untuk komoditas pisang realisasi 215.698,41 kw meningkat 32,643 kw bila dibandingkan tahun 2023 (183.055,49 kw); komoditas alpukat terealisasi 7.585,54 kw meningkat bila dibandingkan capaian 2023 sebesar 4.218,36 kw dan komoditas durian tahun 2024 produksinya sebesar 2.171,73 kw menurun bila dibandingkan capaian 2023 sebesar 4.136,48 kw (tabel III.16). Petani di Gunungkidul mulai beralih dari tanaman palawija ke hortikultura, dengan alasan keuntungan yang didapat dengan bertani tanaman



hortikultura, seperti bawang merah memang cukup menjanjikan dan harga jualnya juga tinggi.

Tabel III.16 Produksi Komoditas Pisang, Durian dan Alpukat
Tahun 2023-2024

No	Komoditas	Produksi (kw)	
		2023	2024
1	Pisang	183.055,49	215.698,41
2	Durian	4.136,48	2.171,73
3	Alpukat	4.218,36	7.585,54

Peningkatan produksi dari komoditas hortikultura khususnya pada buah pisang, durian dan alpukat didukung adanya bantuan durian dari APBN pusat melalui dana TP, selain itu juga ada bantuan intensifikasi yang tentunya membantu meningkatkan produksi dari masing-masing komoditas. Untuk pisang sendiri selain adanya intensifikasi dari pemerintah pusat juga adanya program perbanyakan dari varietas yg sebelumnya sudah di bantukan di Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan pada komoditas alpukat adanya penambahan luas tanam secara swadaya serta dari pihak-pihak swasta.

Dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas komoditas pertanian baik tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura pada tahun 2024 juga telah dilaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi. Penyaluran pupuk bersubsidi ditujukan untuk peningkatan produksi pertanian dan pengalokasian yang cukup sesuai kebutuhan telah di tetapkan dengan SK Bupati Gunungkidul Nomor 132/KPTS/2024 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Urea 21.179 ton; NPK 17.251 ton; dan NPK Formula Khusus 62 ton.

Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi F6 Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 53,38% atau 11.306,798 ton urea dari alokasi 21.179 ton, NPK sebanyak 56,92% atau 9.819,006 ton dari alokasi 17.251 ton dan sebanyak 14,11% atau 8,75 ton dari alokasi 62 ton. Adapun rincian alokasi



dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2024 ada pada tabel dibawah ini.

Tabel III. 17 Alokasi Pupuk bersubsidi TA 2024 Kab. Gunungkidul

No	Kapanewon	Jenis Pupuk (ton)		
		Urea	NPK	NPK Formula Khusus
1	Panggang	851	467	0
2	Purwosari	596	303	0
3	Paliyan	728	583	0
4	Saptosari	1.007	1.065	0
5	Tepus	776	495	0
6	Tanjungsari	622	430	0
7	Rongkop	707	315	0
8	Girisubo	699	808	0
9	Semanu	1.211	909	0
10	Ponjong	3.015	2.725	18
11	Karangmojo	1.067	1.497	0
12	Wonosari	1.386	1.181	0
13	Playen	1.582	1.160	0
14	Patuk	1.238	1.175	44
15	Gedangsari	1.457	680	0
16	Nglipar	1.085	616	0
17	Ngawen	1.049	838	0
18	Semin	2.103	2.004	0
Jumlah		21.179	17.251	62

Tabel III.18 Penyaluran Pupuk dari Kios ke Petani/Kelompok Tani (F6)

No	Kapanewon	Jenis Pupuk (ton)		
		Urea	NPK	NPK Formula Khusus
1	Panggang	405,850	333,400	0
2	Purwosari	289,362	205,435	0
3	Paliyan	471,500	428,850	0
4	Saptosari	670,616	629,106	0
5	Tepus	500,180	220,959	0
6	Tanjungsari	462,175	273,395	0
7	Rongkop	584,169	250,409	0
8	Girisubo	469,263	258,290	0
9	Semanu	699,212	587,410	0



No	Kapanewon	Jenis Pupuk (ton)		
		Urea	NPK	NPK Formula Khusus
10	Ponjong	1.168,081	1293,833	0
11	Karangmojo	578,349	847,709	0
12	Wonosari	503,822	542,984	0
13	Playen	716,150	693,200	0
14	Patuk	600,988	766,871	8,750
15	Gedangsari	752,000	449,000	0
16	Nglipar	569,000	453,455	0
17	Ngawen	663,200	592,150	0
18	Semin	1.202,900	992,550	0
Jumlah		11.306,817	9.819,006	8,750

Tabel III.19 Penyaluran Pupuk dari Distributor ke Kios (F5)

No	Kapanewon	Jenis Pupuk (ton)		
		Urea	NPK	NPK Formula Khusus
1	Panggang	403,00	331,00	0
2	Purwosari	290,00	184,00	0
3	Paliyan	470,00	426,00	0
4	Saptosari	667,50	624,50	0
5	Tepus	495,00	220,50	0
6	Tanjungsari	452,50	260,00	0
7	Rongkop	583,70	250,00	0
8	Girisubo	468,40	250,00	0
9	Semanu	616,00	584,00	0
10	Ponjong	1.117,00	1.221,00	0
11	Karangmojo	573,00	843,00	0
12	Wonosari	492,00	541,00	0
13	Playen	716,00	693,00	0
14	Patuk	591,00	748,00	8,75
15	Gedangsari	752,00	449,00	0
16	Nglipar	534,00	440,00	0
17	Ngawen	663,00	590,00	0
18	Semin	1.269,00	992,10	0
Jumlah		11.153,10	9.647,10	8,75

Alokasi pupuk bersubsidi yang didapatkan Kabupaten Gunungkidul sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan petani. Akan tetapi setelah



dibandingkan antara alokasi dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi, khususnya penyaluran dari kios pengecer ke petani/keompok tani masih belum terserap seratus persen. Ada beberapa hal yang menyebabkan realisasi belum maksimal, antara lain adanya kondisi iklim yang mengalami elnino pada musim tanam pertama tahun 2023 sehingga musim hujan mundur yang selanjutnya musim tanam juga mundur sampai pada tahun 2024 serta musim kemarau yang datangnya tepat waktu mengakibatkan pupuk bersubsidi yang telah ditebus tahun sebelumnya oleh petani belum seluruhnya digunakan, mungkin diperlukan evaluasi penyusunan RDKK pupuk bersubsidi dengan menyandingkan dengan luasan baku lahan pada masing-masing lokasi pertanaman baik sub sektor tanaman pangan maupun hortikultura. Ada sebagian petani yang pada saat pembelian pupuk bersamaan dengan kondisi pemenuhan kebutuhan social, misalnya jagongan. Ada pula disebabkan dinamika kelembagaan di suatu kelompok tani, ada juga petani yang kurang peduli dan merasa sulit ketika kartu tani yang dimiliki ada permasalahan dan lain sebagainya.

Distribusi pupuk bersubsidi masih dengan sistem tertutup, yaitu pelaksana pupuk subsidi dalam hal ini adalah PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company) sebagai produsen menyalurkan pupuknya ke Distributor, selanjutnya Distributor menyalurkan pupuknya ke Pengecer, terakhir Pengecer menyalurkan ke petani baik penebusannya secara kolektif maupun mandiri. Penyaluran pupuk ke petani dengan menggunakan kartu tani dan KTP (ipubers). Penyaluran dari kios pengecer ke petani mengikuti regulasi yang telah ditetapkan. Pupuk yang telah disalurkan dilakukan mekanisme verifikasi oleh tim verifikasi.

Masih terkait dengan pupuk bersubsidi adalah kegiatan pengawasan pupuk bersubsidi. Kegiatan ini meliputi kunjungan ke distributor, kios pengecer, Balai Penyuluh Pertanian dan kelompok tani. Untuk kunjungan yang dapat dilaksanakan pada Tahun 2024 antara lain Gudang Lini III Jeruk Wonosari (urea), Gudang Lini III Mijahan (NPK, NPK Formula Khusus), Distributor PT. PPI, Kios UD. Setia Tani 2, Kios Garuda Emas, UD. Arif, CV.



Galih Mulia, KUD Karya Bhakti, Kios Uaha Tani, Kios Prima Tani, Toko Bina Tani, Kios Konco Tani, Kios Abdi Tani, Toko Sumber Tani dan Balai Penyuluhan Pertanian serta kelompok tani atau gapoktan bersamaan dengan kegiatan yang lain.

Adapun untuk koordinasi, monitoring maupun evaluasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi juga diadakan pertemuan, antara lain sosialisasi pupuk bersubsidi dan penyusunan RDKK pupuk bersubsidi, pembahasan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi dan progress rekapitulasi penyusunan RDKK pupuk bersubsidi, Pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyaluran pupuk bersubsidi, Koordinasi bersama Satgasusgah Bareskrim Polri, dan membahas kesiapan musim tanam MH I.

**Tabel III.20 Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024**

No	Kecamatan	Distributor Pt. Petrokimia Gresik	Distributor Pt. Pusri	Pengecer Resmi/Kios Pupuk Lengkap
1	Panggang	PT. Alam Raya	PT. PPI Yogyakarta	UD. SARANA TANI
				UD. Utama Jaya
2	Purwosari	PT. Alam Raya	PT. PPI Yogyakarta	UD. Arif
				Kios Sarindi
				UD. Barokah
3	Paliyan	PT. Alam Raya	PT. PPI Yogyakarta	Toko Engkan Jaya
				KUD Widodo
				UD Garuda Emas
4	Saptosari	CV. Kaneka Tani	KUD Mekar Rongkop	Toko Purbo Winarto
		Plembutan		Toko Hadi Rukun
5	Tepus	CV. Kaneka Tani	KUD Mekar Rongkop	Dwi Manunggal
		Plembutan		Toko Sekar Abadi
6	Tanjungsari	CV. Kaneka Tani	KUD Mekar Rongkop	Kop. Tani Wijaya
		Plembutan		Kios Sang Surya
7	Rongkop	CV. Kaneka Tani	KUD Mekar Rongkop	Toko Restu
		Plembutan		Kios krista
8	Girisubo	CV. Kaneka Tani	KUD Mekar Rongkop	UD. Mitra Tani
		Plembutan		Kios Ngudi Rejeki
				UD. Sari Mulyo
9	Semanu	CV. Kaneka Tani	KUD Subur Semin	Kios Handayani
		Plembutan		Kios Tani Mulya

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



No	Kecamatan	Distributor Pt. Petrokimia Gresik	Distributor Pt. Pusri	Pengecer Resmi/Kios Pupuk Lengkap
				KUD. Bima
10	Ponjong	CV. Kaneka Tani	KUD Subur Semin	Toko Tani Maju
		Plembutan		Toko Usaha Tani
11	Karangmojo	CV. Kaneka Tani	KUD Mekar Rongkop	UD. Tani Makmur
		Plembutan		Kios Yayuk
12	Wonosari	CV. Kaneka Tani	KUD Mekar Rongkop	UD. Setia Tani 2
		Plembutan		UD. Mentas
13	Playen	PT. Alam Raya	PT. PPI Yogyakarta	Toko ST-Mart
				Toko Abdi Tani
				UD Murni Rizki
14	Patuk	PT. Alam Raya	PT. PPI Yogyakarta	Konco Tani
				Toko Anugerah
15	Gedangsari	PT. Alam Raya	KUD Subur Semin	CV. Galih Mulia
				KUD Karya Bhakti
16	Nglipar	CV. Kaneka Tani	KUD Subur Semin	Kios Moro Seneng
		Plembutan		UD. Mitra Kerja
17	Ngawen	CV. Kaneka Tani	KUD Subur Semin	Toko Rahayu Mulyo
		Plembutan		Kios Daniar
				Toko Prima Tani
18	Semin	CV. Kaneka Tani	KUD Subur Semin	Toko Bina Tani
		Plembutan		Toko Melia



Verifikasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan alsintan dilaksanakan untuk mengawal penyediaan administrasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan hibah alat dan mesin pertanian baik pada Tahun Anggaran 2024 maupun hibah alat dan mesin pertanian sebelumnya.



Kunjungan berupa monev alsintan dilaksanakan untuk memantau kondisi secara fisik alat dan mesin serta administrasi pengelolaan alat dan mesin pertanian yang diterima kelompok. Secara umum alat dan mesin pertanian yang telah diterima telah digunakan oleh kelompok tani penerima.

Selama Tahun 2024 jumlah ketersediaan sarana alat dan mesin pertanian yang bersumber dari APBD 68 unit, APBN 77 unit dan APBD Provinsi 13 unit. Data sarana alat dan mesin pertanian tahun 2024 seperti pada tabel III.21 di bawah ini.

Tabel III.21 Data Sarana Pertanian Tahun 2024

No	Jenis Alsintan	Jumlah Berdasar Sumber Dana			Jumlah (Unit)
		APBD	APBN	APBD Prov	
1	Traktor roda 2 Capung	4			4
2	Traktor roda 2 Impala		10	13	23
3	Traktor Roda 2	19			19
4	Power Thresher	10			10
5	Cultivator	19			19
6	Cultivator RTH	2			2
7	Pompa Air 3"		14		14
8	Pompa Air 4"		15		15
9	Pompa Air 6"		7		7
jumlah		73	64	39	176



Selain dukungan sarana berupa alat dan mesin pertanian, Tahun 2024 melalui berbagai sumbe dana, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul juga melaksanakan Pembangunan prasarana untuk mendukung Pembangunan pertanian. Sarana dan Prasarana yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada Masyarakat dapat dilihat pada tabel III.22 dibawah ini.



Tabel III.22 Data Prasarana Pertanian Tahun 2024

No	Jenis Prasarana Pertanian	Jumlah Berdasar Sumber Dana			Jumlah (Unit)
		APBD	APBN	APBD Prov	
1	Alat dan Mesin Pertanian	66	77	13	156
2	Sumur Dangkal (DAK)	4			4
3	Sumur Dalam (DAK)	10			10
4	Bangunan Pelengkap Irigasi (DAK)	2			2
5	Jalan Produksi Perkebunan (DAK)	1			1
6	Jalan Usaha Tani Hortikultura (DAK)	1			1
7	Sumur (DBHCHT)	1			1
8	Jalan Usaha Tani (PIS)	1			1
9	Pengembangan Lumbung Mataraman (DAIS)	6			6
10	Irigasi Perpompaan		38		38
11	Pengembangan RJI		3		3
12	Irigasi Perpipaan		1		1
13	ekstensifikasi kelapa	11			11
14	Sarana Budidaya Bawang Merah	4			4
15	KRPL	1			1
Jumlah		92	119	13	224

Selama tahun 2024, keberhasilan penambahan kelompok yang menerapkan agribisnis terpadu berupa kelas kelompok utama diharapkan dapat terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota kelompoknya dan masyarakat di sekitarnya.

Salah satu cara untuk meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani yaitu dengan melakukan pembinaan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan klasifikasi kemampuan kelompok tani. Tujuan pembinaan kelas kelompok tani adalah :

- Meningkatkan pemahaman dan wawasan anggota kelompok tani terhadap kemampuan kelompoknya.
- Meningkatkan klasifikasi kemampuan kelompok tani.



Strategi peningkatan kelas kemampuan kelompok tani yang telah dilakukan melalui pembinaan dari para penyuluh yang ada di 18 BPP di tiap kapanewon di Kabupaten Gunungkidul dilakukan melalui pembinaan berupa:

- Pengembangan sumberdaya manusia (SDM)
- Pengembangan modal
- Pengembangan usaha
- Pengembangan kelembagaan usaha

Penilaian kelas kemampuan kelompok tani rutin dilaksanakan setiap tahun. Sesuai pedoman pelaksanaannya, penilaian kelas kemampuan kelompok tani akan dilaksanakan di bulan September setiap tahun. Tujuan penilaian kelas kemampuan kelompok tani antara lain adalah :

- Mengetahui kemampuan kelompok tani yang ditinjau dari berbagai aspek
- Menyediakan bahan perumusan kebijakan dan strategi pemberdayaan petani
- Mengetahui metodologi dan pemetaan kebutuhan penyuluhan pada masing-masing kelas kemampuan kelompok tani
- Menyediakan informasi yang lengkap dalam database kelompok tani melalui SIMLUHTAN
- Meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kelompok tani
- Sebagai dasar pemilihan metode/ strategi pembinaan kelompok tani sesuai kelas kemampuannya

Materi penyuluhan dipublikasikan melalui berbagai bentuk, diantaranya melalui media video penyuluhan dan media cetak seperti leaflet, informasi di laman *pertanian.gunungkidulkab.go.id*. dan sudah di upload di aplikasi <https://laporanutama.pertanian.go.id/>



Sumber : https://laporanutama.pertanian.go.id/index_penjab.php

Gambar III.1 PENJAB KAB

Jumlah peningkatan kapasitas SDM penyuluh diukur melalui peningkatan kompetensi SDM penyuluh pertanian. Keberhasilan dalam membina kelompok didukung oleh lingkungan strategis dalam pengembangan SDM pertanian meliputi:

- a. Keberadaan lembaga-lembaga penyuluhan pertanian di daerah yang mendukung pelaksanaan pengembangan SDM Pertanian seperti: Bakorluh, Bapelluh, Kelembagaan yang menangani penyuluhan, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Kelompok tani (Poktan);
- b. Keberadaan petugas dan penyuluh pertanian di daerah seperti Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Swadaya, dan P3K Penyuluh.
- c. Dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian;

Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Dari sisi usia petani, diketahui bahwa usia muda di sektor pertanian masih cukup tinggi, walaupun semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian. Secara umum, sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan, kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi



alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya.

Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Dilihat dari sisi pendidikan, tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat Sekolah Dasar mencapai 66,42%, disusul oleh lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 16,13% dan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 14,33%. Dengan pendidikan yang masih didominasi SLTP ke bawah dan munculnya kelompok petani baru yang belum berpengalaman, diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi (*vocational training*), serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru. Oleh sebab itu langkah-langkah konkret perlu dilakukan dengan mengenalkan remaja usia sekolah di mulai dari sekolah menengah tentang dunia pertanian yang menguntungkan dan menyenangkan. Upaya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembelajaran, sehingga pada akhirnya mampu menghasilkan generasi muda yang kompeten, yang diharapkan mampu menciptakan peluang kerja di tingkat lapangan, baik sebagai petani maju atau wirausahawan muda pertanian.

Korporasi petani dibangun melalui pemberdayaan petani dengan mengkonsolidasikan petani dalam suatu kelembagaan petani (kelompok/gabungan kelompok tani) yang didorong untuk bertransformasi menjadi kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) diharapkan meningkatkan skala usaha petani karena tergabung dalam kelompok yang lebih besar, menjalankan usaha dengan manajemen yang profesional, meningkatkan aksesibilitas permodalan dan infrastruktur, jangkauan pasar, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang



Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 80 mengamanatkan Kelembagaan Ekonomi Petani dapat berupa Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, menyatakan bahwa korporasi petani merupakan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Kepemilikan modal petani yang besar ini berfungsi untuk meningkatkan produktivitas, skala ekonomi, daya saing, pendapatan petani dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani.

Keberhasilan dalam mencapai pembangunan pertanian berkelanjutan sangat ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki komitmen untuk membangun sektor pertanian. Adapun kondisi semakin menuanya petani dan semakin menurunnya minat usia muda terjun ke bidang pertanian tentu saja akan menambah persoalan klasik SDM pada bidang pertanian selama ini. Ada beberapa upaya pemerintah dalam melakukan regenerasi petani dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya melalui program-program yang dirumuskan Kementerian Pertanian yang mendorong lahirnya satu juta petani milenial setiap tahunnya (Kementan RI, 2020). Milenial merupakan sebutan untuk generasi muda di era teknologi modern ini. Bentuk komitmen pemerintah dalam melahirkan jutaan petani milenial tersebut mendorong BPPSDMP menetapkan tiga ciri generasi petani milenial dimana petani milenial berusia 19 – 39 tahun, memiliki jiwa milenial, bersifat adaptif terhadap teknologi digital, dan tentunya memiliki jaringan kerjasama usaha

Sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas sebagai pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian akan mampu membangun sistem pertanian. Pencapaian kinerja peningkatan SDM pertanian melalui



pelaksanaan kegiatan tersebut didukung Sumber Daya Pertanian sebagai berikut :

Tabel III.23 Sumber Daya Pertanian Tahun 2024

No	Jenis Data	Jumlah
1	Penyuluh PNS	53 orang
2	Penyuluh Pertanian (P3K)	47 orang
3	Penyuluh Pertanian Swadaya	144 orang
4	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	144 kelompok
5	Kelompok tani (Poktan)	3.345 kelompok
6	KEP	185 kelompok
7	Petani	148.913 orang

Dana Alokasi Khusus tahun 2024 yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Pangan berupa pembangunan infrastruktur pemanfaatan sumber sumber air, jalan usaha tani dan sarana BPP. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Kebijakan pemanfaatan DAK Fisik Pertanian diarahkan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian serta kinerja pembangunan pertanian.

DAK Bidang Pertanian tahun 2024 dimanfaatkan untuk Pembangunan sebanyak 5 unit, Pembangunan Jalan Pertanian 4 unit, dan Pembangunan irigasi air tanah dalam sektor tanaman pangan sebanyak 8 unit. Lokasi hasil CPCL kelompok sebagai penerima DAK Fisik Tahun 2024 seperti yang tertera pada tabel III.24 dibawah ini.

Tabel III.24 Penerima DAK Fisik Pertanian Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan					Pagu
I	HIBAH PEMBANGUNAN IRIGASI AIR TANAH DALAM TANAMAN PANGAN					
1	Kelompok Tani Sari Kismo	Mulusan, Paliyan	1	Unit	285.000.000	2.850.000.000
2	Kelompok Tani Taruna Tani Karya Bakti	Bleberan, Playen	1	Unit	285.000.000	
3	Kelompok Tani Ngudi Lestari	Ngalang, Gedangsari	1	Unit	285.000.000	

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



No	Uraian Kegiatan					Pagu
4	Kelompok Tani Margo Rukun	Hargomulyo, Gedangsari	1	Unit	285.000.000	
5	Kelompok Tani Lumintu	Rejosari, Semin	1	Unit	285.000.000	
6	Kelompok Tani Tani Raharjo	Sumberejo, Semin	1	Unit	285.000.000	
7	Kelompok Tani Sedyo Makarti	Sepat, Ngoro oro, Patuk	1	Unit	285.000.000	
8	Kelompok Tani Sari Mulyo	Gambiran, Bunder, Patuk	1	Unit	285.000.000	
9	Kelompok Tani Baran Rejo	Baran, Salam, Patuk	1	Unit	285.000.000	
10	Kelompok Tani Sumber Rejo	Dengok, Playen	1	Unit	285.000.000	
II	HIBAH KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI					
1	Kelompok Tani Sido Makmur	Kalangan 2, Ngipak, Karangmojo	1	Unit	95.000.000	190.000.000
2	Kelompok Tani Rukun Santoso	Semoyo Patuk	1	Unit	95.000.000	
III	HIBAH JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN					
1	Kelompok Tani Agung Rejeki	Bedil Wetan, Rejosari, Semin	1	Unit	285.000.000	285.000.000
IV	HIBAH JALAN USAHA TANI					
1	Kelompok Tani Ngudi Subur	Banyubening 2, Bejiharjo, Karangmojo	1	Unit	190.000.000	190.000.000
V	PEMBANGUNAN IRIGARI AIR TANAH DANGKAL HORTIKULTURA (					
1	Kelompok Tani Sedyo Rukun	Mulo, Mulo, Wonosari	1	Unit	142.500.000	570.000.000
2	Kelompok Tani Doyong Rejo	Dunggubah, Duwet, Wonosari	1	Unit	142.500.000	
3	Kelompok Tani Ekomartani	Praon, Pulutan, Wonosari	1	Unit	142.500.000	
4	Kelompok Tani Dadi Mulyo	Pangkah, Candirejo, Semin	1	Unit	142.500.000	
VI	SARANA DATA DAN INFORMASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN					
1	BPP PANGGANG	Jl. Legundi-Girikarto KM 0,5 Girimulyo, Panggang	1	unit	49.150.000,00	884700000
	001 - PC All in one					
	002 - HDMI Splitter					
	003 - Kabel HDMI 0,6 M					
VI	SARANA DATA DAN INFORMASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN					
	004 - LCD Projector					
	005 - Wireless Sound Speaker					
	006 -Multimedia Sound Speaker					

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



No	Uraian Kegiatan					Pagu
	007 - Wireless Microphone System					
	008 - Uninterruptible Power Supply (UPS)					
	009 - Web Camera					
	010 - USB Extender					
	011 - Smart TV Monitor 43 Inch					
	012 - Kabel HDMI 5M					
2	BPP WONOSARI	Jl. Ki Ageng Wonontoro, Tawarsari, Wonosari,	1	unit	49.150.000,00	
3	BPP SEMANU	Jl.Semanu-Wonosari KM 3,5 Sambirejo, Semanu	1	unit	49.150.000,00	
4	BPP KARANGMOJO	Jl. Karangmojo - Ponjong KM 2, Karangduwet I, Karangmojo	1	unit	49.150.000,00	
5	BPP NGILPAR	Jl. Nglipar- Yogya KM 35 Kedungkeris, Nglipar	1	unit	49.150.000,00	
6	BPP NGAWEN	Tempuran Wetan,Kampung. Kec. Ngawen ,	1	unit	49.150.000,00	
7	BPP SEMIN	Jl.Semin- Cawas Km 4 Logantung, Sumberejo, Semin,	1	unit	49.150.000,00	
8	BPP PATUK	Jl. Yogja-Wonosari Km. 15, Putat,Kec. Patuk,	1	unit	49.150.000,00	
9	BPP RONGKOP	Jl. Baran- Sadeng KM 3 Semugih, Kec. Rongkop,	1	unit	49.150.000,00	
10	BPP GIRISUBO	Jl. Baran- Sadeng KM 7 Dompok, Jeruk Udel, Girisubo	1	unit	49.150.000,00	
11	BPP TEPUS	Jl. Wonosari- Jepitu KM 17 Bintaos, Sidoharjo, Tepus	1	unit	49.150.000,00	
12	BPP SAPTOSARI	Jl. Wonosari-Panggang KM 22 Jetis, Jetis, Saptosari 55871	1	unit	49.150.000,00	
VI	SARANA DATA DAN INFORMASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN					
13	BPP GEDANGSARI	Watugajah, Gedangsari,	1	unit	49.150.000,00	

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



No	Uraian Kegiatan					Pagu
14	BPP PALIYAN	Karangasem, Desa Karangasem, Paliyan	1	unit	49.150.000,00	
15	BPP PLAYEN	Jl. Wonosari- Yogya KM 6,5 Bandung, Playen,	1	unit	49.150.000,00	
16	BPP TANJUNGSARI	Dusun Keruk III, Banjarejo, Kec. Tanjungsari,	1	unit	49.150.000,00	
17	BPP PURWOSARI	Jl. Parangtritis- Panggang KM 3 Dlingo, Girijati, Purwosari	1	unit	49.150.000,00	
18	BPP PONJONG	Dusun Susukan I, Desa Genjahan, Kec. Ponjong,	1	unit	49.150.000,00	
					TOTAL	4.969.700.000



Pagu DAK Fisik Pertanian untuk Pembangunan fisik yang dikerjakan dengan metode swakelola sebesar Rp4.969.700.000,00 dan untuk pagu



penunjang sebesar Rp230.300.000,00 dengan total pagu sebesar Rp5.200.000.000,- Realisasi fisik untuk kegiatan DAK bidang pertanian Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Tanaman Pangan sebanyak 10 unit, Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Irigasi 2 unit, Jalan Produksi Perkebunan sebanyak 1 unit, Jalan Usaha Tani 1 unit, Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Hortikultura 4 unit semua terealisasi 100%. Sedangkan untuk Sarana Data Dan Informasi Balai Penyuluhan Pertanian 18 unit. Dari total pagu sarana data Rp884.700.000,00 terealisasi Rp879.480.000,00 (98,37%)

Tenaga Pendamping sebagai fasilitator digunakan untuk pendampingan pada kegiatan pembangunan irigasi air tanah dangkal, pembangunan irigasi air tanah dalam, pembangunan bangunan pelengkap irigasi, Jalan usaha tani dan jalan produksi tani. Tenaga fasilitator diberikan honor dari dana penunjang DAK selama 4 bulan kerja atau sampai proses pembangunan selesai sesuai SK Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Teknis (Fasilitator) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pembangunan Sarana Pertanian di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Selain Dana DAK Fisik Pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan juga mendapatkan dana DAK Non Fisik TA 2024. Ketentuan tentang kegiatan ini di atur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian TA 2024. Dinas Pertanian dan Pangan memperoleh 1 kegiatan dari Bidang Penyuluhan. Dana DAK Non fisik sebesar Rp235.000.000,00. DAK non fisik ini di diperuntukkan untuk kegiatan pelatihan tematik, penyusunan dan pencetakan laporan. sedangkan komponen kegiatan untuk honor petugas admin BPP, paket data di BPP, koordinasi ke dinas, bahan dan atk pelaporan.



Target untuk kegiatan DAK Non Fisik Pertanian di Kabupaten Gunungkidul TA 2024 adalah Jumlah BPP penerima kegiatan pendataan data pertanian. DAK Non Fisik dari anggaran Rp235.000.000,00 terealisasi sebesar Rp235.000.000,00 atau 100%.

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan luas lahan 0,8 ha merupakan UPTD yang berfungsi sebagai tempat percontohan tanaman, UPTD Balai benih juga telah menjalin kerjasama dengan kelompok tani di sekitar lingkungan Kapanewon Karangmojo dan Kapanewon Ponjong dengan cara penyediaan benih bagi petani dan pembelian calon benih yang dihasilkan petani dibawah pengawasan BPSB Provinsi DI. Yogyakarta. Hasil pengembangan benih inti Segreng Handayani yang dilakukan oleh UPT Balai Benih Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul cukup baik.



Dari perbanyakan benih segreng handayani mampu menghasilkan benih sebanyak 12 kg siap tanam. Pengembangan 12 kg ini yang merupakan benih label kuning akan dapat ditanam pada areal seluas 4.000 m2 dengan hasil antara 750 – 1.000 kg benih label putih.

Segreng Handayani yang telah dipanen akan dikembangkan pada awal musim



hujan th 2023/2024. Benih segreng handayani ini sudah dilakukan seleksi CVL (Campuran Varietas Lain) oleh BPTP Yogyakarta.

Dalam tahun 2024 , UPTD Balai benih mendapatkan target PAD Penjualan benih padi Rp103.662.000,00 dan terealisasi sebesar Rp76.618.150,00 atau 73,91% yang diperoleh dari hasil produksi penangkaran benih padi musim hujan MH 1 dan MH 2 serta hasil opkup benih padi setelah diproses menjadi benih berlabel.



Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran pada awalnya merupakan salah satu Taman Sains Pertanian / Taman Teknologi Pertanian yang dibangun oleh Badan Litbang Pertanian, hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Nawa Cita yang diusung oleh pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran maka Unit Kerja TTP Nglanggeran menjadi UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran di bawah garis komando Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.

Kakao menjadi salah satu komoditas utama yang ada di daerah Nglanggeran, maka dari itu UPT TTP Nglanggeran hadir untuk menjadi wadah bagi para warga dalam mengoptimalkan pemanfaatan kakao. Dengan adanya UPT TTP Nglanggeran, maka warga melakukan proses fermentasi cokelat. Banyaknya tanaman kakao yang tumbuh disekitar wilayah Nglanggeran, dan adanya ternak Kambing PE menjadi wadah bagi masyarakat Nglanggeran untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkannya, dengan memproduksi produk-produk yang berbasis cokelat dan susu Kambing PE, termasuk di dalamnya terdapat pabrik kecil yang menjadi tempat produksi bagi kedua komoditas tersebut.



Dukungan fasilitas yang ada di UPT TTP Nglanggeran antara lain Gedung TTP dan Fasilitas Pendukungnya (Taman, Menara Pandang). Pabrik Pengolahan (coklat dan susu); Gerai Coklat, Alsintan dan mesin olahan coklat; Lahan usaha kakao, Lahan pembibitan kakao; Ruang pelatihan pengolahan dan produksi; Pusat desain, Demplot dan Kantor bersama, percontohan produksi, pusat layanan bisnis pertanian dan wisata.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- a. Mayoritas petani masih mengandalkan pola pertanian konvensional yang belum secara optimal mensejahterakan petani;
- b. Belum optimalnya penerapan industri pertanian yang berorientasi pada pengembangan produk pertanian yang berdaya saing tinggi;
- c. Program kegiatan untuk meningkatkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian belum terencana optimal.
- d. Alih Fungsi Lahan cukup berperan terhadap capaian produksi pertanian.
- e. Keberadaan usia tenaga kerja produktif sektor pertanian dan tingkat pendidikan.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Selalu mempertimbangkan aspek perubahan iklim dalam perencanaan program dan kegiatan



2. Pendampingan secara intensif kepada kelompok tani untuk menerapkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi pertanian.
3. Mengubah sistem pertanian tradisional menjadi pertanian yang modern berbasis mekanisasi pertanian agar sistem usaha tani lebih efisien.
4. Menerapkan sistem pemupukan berimbang dan optimalisasi tumpangsari.
5. Melakukan penataan pola tanam.
6. Mendorong petani menggunakan bibit unggul.
7. Mendorong pemberdayaan kelembagaan petani.
8. Pelayanan teknis (pembinaan/pendampingan) dalam budidaya dan pengolahan hasil industri kehutanan dan perkebunan.
9. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka pemasaran hasil perkebunan/hortikultura.
10. Meningkatkan dukungan penyuluh

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Dukungan anggaran baik melalui dana APBD, Dana Keistimewaan, dan APBN dalam pengembangan kawasan komoditas unggulan per subsektor.
2. Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan.
3. SDM aparatur pelaksana yang kompeten.
4. Penyediaan benih unggul yang bersertifikat.
5. Penyediaan sarana prasarana yang mendukung peningkatan produksi.
6. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan antisipasi dampak perubahan iklim sedini mungkin.
7. Penerapan GAP (*Good Agriculture Practice*) di tingkat petani.
8. Pendampingan dari petugas lapangan pertanian.
9. penerapan sistem manajemen usaha tani yang sesuai
10. Penanganan pascapanen, pengolahan, fasilitasi pemasaran, standarisasi mutu, pembinaan usaha pertanian yang berkelanjutan.
11. Pelayanan berkualitas di bidang manajemen dan kesekretariatan.



Sasaran 2: Ketahanan Pangan Meningkat

Kinerja sasaran Ketahanan Pangan Meningkat diukur dengan indikator Capaian Skor PPH Konsumsi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.25 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
Ketahanan Pangan Meningkat	Capaian Skor PPH Konsumsi	Jumlah angka yang dicapai dalam keragaman konsumsi kelompok pangan (%AKG x bobot masing-masing kelompok pangan)

Tabel III.26 Capaian Sasaran Ketahanan Pangan Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2024			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Ketahanan Pangan Meningkat	Capaian Skor PPH Konsumsi	90	91,4	101,56	Sangat Tinggi

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-rata 101,56% yang masuk kategori sangat tinggi. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Capaian kinerja tahun 2024 pada sasaran ketahanan pangan meningkat (91,4) bila dibandingkan dengan target Pemda DI Yogyakarta (94,4) masih dibawah target begitu juga bila dibandingkan dengan target nasional yang berada di angka 94 untuk capaian skor PPH Konsumsi secara nasional.



Tabel III.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 serta
Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024		
Ketahanan Pangan Meningkat	Capaian Skor PPH Konsumsi	91.3	93.01	91.4	92	103,12

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja fluktuatif. Dimana pada tahun 2022 dan 2023 data perhitungan PPH Konsumsi masih menggunakan T-1, sedangkan pada tahun 2024 perhitungan PPH Konsumsi menggunakan data tahun berjalan. Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran. Ketahanan Pangan Meningkat ini adalah Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator Capaian Skor PPH Ketersediaan; Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan indikator Persentase penanganan kerawanan pangan; Program Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan indikator Persentase pangan segar aman; Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana dengan baik ; Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.28 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Program

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
2	Ketahanan Pangan Meningkat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Capaian Skor PPH Ketersediaan	Jumlah angka yang dicapai dalam keragaman ketersediaan kelompok pangan (% AKE x bobot masing-masing kelompok pangan)
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	(Jumlah penanganan kerawanan pangan yang terlaksana / jumlah seluruh layanan) x 100%



NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman	(Jumlah sampel pangan yang aman tahun ke n dibagi jumlah total sampel tahun ke n) x 100%
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana dengan baik	(Jumlah penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan / jumlah penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana dengan baik) x 100%

Tabel III.29 Capaian Kinerja Sasaran Ketahanan Pangan Meningkat

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Ketahanan Pangan Meningkat	Capaian Skor PPH Konsumsi	101.56	1 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penurunan konsumsi beras/ kapita/tahun	76	76	100 Sangat Tinggi
			2 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	100	100	100 Sangat Tinggi
			3 Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman	90	90	100 Sangat Tinggi
			4 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana dengan baik	100	100	100 Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM							100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Ketahanan Pangan Meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat



2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan
4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kebudayaan

Indikator Kinerja Ketahanan Pangan

Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkesinambungan, berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yang merumuskan ketahanan pangan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau” dan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, maka implementasi pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan 3 (tiga) komponen utama yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Ketersediaan pangan yang cukup dan merata;
- b. Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; serta
- c. Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.

Pola pangan harapan adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Skor PPH menunjukkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat, dimana semakin beragam, semakin tinggi pula skor PPH nya. Nilai maksimal untuk skor PPH ideal adalah 100.

Kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, dan kacang-kacangan masih berada dibawah skor ideal dengan selisih cukup banyak. Hal ini perlu mendapat perhatian berbagai pihak agar terwujud pemenuhan kebutuhan gizi seimbang atau kualitas konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Pola Pangan Harapan berdasarkan data survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kabupaten Gunungkidul



tahun 2024 mempunyai skor sebesar 91,4 (seperti terlihat dalam Tabel III.27). Skor PPH tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan skor PPH Susenas tahun 2023 (skor PPH 93,01). Secara berturut-turut skor PPH tahun 2024 berdasarkan kelompok pangan tersaji seperti pada Tabel III.30

Tabel III.30 Skor PPH Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	281,1	1.079	54,0	51,4	0,5	27,0	25,7	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	56,5	67	3,4	3,2	0,5	1,7	1,6	2,5	1,6
3	Pangan Hewani	87,3	193	9,7	9,2	2,0	19,4	18,4	24,0	18,4
4	Minyak dan Lemak	29,6	267	13,4	12,7	0,5	6,7	6,4	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	7,6	41	2,1	2,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	34,2	94	4,7	4,5	2,0	9,4	8,9	10,0	8,9
7	Gula	23,1	89	4,4	4,2	0,5	2,2	2,1	2,5	2,1
8	Sayur dan Buah	236,7	123	6,2	5,9	5,0	30,9	29,4	30,0	29,4
9	Lain-lain	77,1	43	2,2	2,0	-	-	-	-	-
	Total		1.996	100,0	95,0		98,3	93,4	100,0	91,4

Secara umum pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Gunungkidul masih belum sesuai dengan PPH ideal (skor PPH 100). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama pola makan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kelompok pangan umbiumbian, pangan hewani, kacang-kacangan, dan sayur buah masih berada dibawah skor ideal/skor maksimal (seperti terlihat pada Tabel III.30). Artinya, konsumsi untuk kelompok pangan tersebut perlu ditingkatkan.

Lahan pekarangan telah lama dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber pangan. Dari waktu ke waktu, peran pekarangan sebagai sumber pangan terus menurun sejalan dengan semakin sempitnya lahan pekarangan akibat pertambahan jumlah penduduk, meningkatnya kesejahteraan dan kecenderungan diferensiasi/spesialisasi pekerjaan, semakin mudahnya memperoleh bahan pangan di pasar, serta terjadinya perubahan selera



masyarakat. Saat ini aspek estetika dalam penataan pekarangan menjadi lebih dominan.

Peran lahan pekarangan sebagai pemasok bahan pangan, dalam beberapa tahun terakhir kembali dimunculkan oleh pemerintah agar kesadaran masyarakat terhadap keseimbangan pangan dan gizi dengan memfungsikan kembali lahan pekarangan sebagai sumber pangan. Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai penyedia bahan pangan potensial bagi keluarga pada dasarnya merupakan salah satu wujud peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan.



Komitmen pemerintah untuk melibatkan peran rumah tangga dalam mewujudkan kemandirian pangan melalui program pemanfaatan pekarangan diaktualisasikan oleh Kementerian Pertanian, salah satunya melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Tahun 2024, Dinas Pertanian dan Pangan melalui Bidang Ketahanan Pangan melaksanakan KRPL dengan sasaran di KWT Ngudi Lestari, Salak, Semoyo, patuk.

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu negara/wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan. Hasil dari Neraca Bahan Makanan tersebut adalah jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari. Informasi ketersediaan pangan ini penting sebagai bahan masukan kebijakan terkait dengan perencanaan produksi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah. Situasi ketersediaan pangan NBM memberikan gambaran situasi ketersediaan pangan secara rata-rata wilayah, dan tidak menggambarkan situasi ketersediaan pangan individu.



Tabel III.31 Ketersediaan Pangan Perkapita Berdasarkan Jenis Bahan Makanan Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2023

Kelompok Pangan	Energi (kkal/hari)	Protein (gram/hari)	Lemak (gram/hari)
Padi-padian	1.376	33,68	5,97
Makanan berpati	657	4,28	12
Gula	93	0,22	0,74
Buah biji berminyak	355	28,24	20,95
Buah-buahan	51	3,87	0,27
Sayur-sayuran	74	0,6	0,75
Daging	84	5,43	6,81
Telur	21	1,6	1,50
Susu	4	0,2	0,22
Ikan	31	5,71	0,65
Minyak dan lemak	311	0,03	18,25
Total	3.056	83,87	57,43
Total Nabati	2.912	70,91	47,80
Total Hewani	144	12,96	9,63

Tingkat ketersediaan energi pada tahun 2023 dari target 2.400 kkal/kap/hari terealisasi 3.056 kkal/hari dengan rincian nabati sebesar 2,912 kkal/hari dan hewani 144 kkal/hari. Penyediaan energi tertinggi ada pada komoditas padi-padian (137,6%), makanan berpati (65,7%) dan buah biji berminyak (35,5%). Untuk target protein tahun 2023 sebesar 63 gram/ hari dengan realisasi dari hasil NBM 83,87 gram/hari dengan rincian nabati 70,91 gram/hari dan hewani 12,96 gram/hari. Penyedia protein tertinggi pada padi-padian (33,68%), buah biji berminyak (28,24%) dan daging (5,43%).

Berdasarkan Rekomendasi WNPG (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi) bahwa AKG Tingkat Ketersediaan yang dianjurkan yakni AKE 2.400 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein sebesar 63 gram/kap/hari sehingga dari angka yang diperoleh dari penghitungan Neraca Bahan Makanan (NBM), angka kecukupan energi dan protein Kabupaten Gunungkidul memenuhi standar yang direkomendasikan.



Pelaksanaan kegiatan keamanan dan mutu pangan segar berupa pengawasan post market baik di pasar tradisional, pasar modern (minimarket, swalayan dan supermarket), pendataan pelaku usaha dan koordinasi dengan petugas Balai Penyuluh Pertanian. Pengawasan di pasar tradisional pada tahun 2024 di laksanakan di UPT. Pengelolaan Pasar Wilayah 1, Kemantren Pasar Playen, UPT. Pengelolaan Pasar Kemantren Pasar Semanu di Pasar Tengeran Karangmojo dan Pasar Munggi Semanu, UPT. Pengelolaan Pasar Kemantren Pasar Wonosari di Pasar Argosari dan UPT. Pengelolaan Pasar Kemantren Pasar Nglipar di Pasar Nglipar dan Pasar Ngalang Gedangsari.

Pengawasan dan pengambilan contoh/sampel pangan segar di Pasar Tengeran Karangmojo masuk dalam kewenangan UPT. Pengelolaan Pasar Kemantren Pasar Semanu. Pasar Tengeran Karangmojo hari pasaranya adalah pahing, sehingga setiap 5 hari sekali pasaran , pedagangnya untuk pangan segar juga berpindah-pindah di wilayah sekitar. Pengawasan dengan pengambilan sampel untuk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) sebanyak 10 macam yaitu : kapri, wortel, cabai merah kriting, buncis, pak coy, kembang kol, kacang panjang dan cabai hijau besar. Pangan segar asal tumbuhan ini berasal dari Tawangmangu, Jawa Tengah. Untuk pangan segar asal ikan (PSAI) yaitu ikan kembung sejumlah satu ekor, asal ikan dari Solo Jawa Tengah. Setelah sampel/contoh kita ambil semua lalu kita lakukan uji dengan rapit tes kit pestisida untuk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan rapit test kit formalin untuk pangan segar asal hewan dan pangan segar asal ikan.

Uji laboratorium bahan pangan segar di lakukan untuk mengetahui cemaran kandungan pestisida yang ada sayuran dan buah-buahan. Uji kandungan cemaran yang di lakukan dengan menggunakan metode spesifikasi kromatografis lapis tipis digunakan untuk mengetahui ada tidaknya cemaran karbamat, organoklorin dan organofosfat pada sayur atau buah. Karbamat merupakan salah satu jenis pestisida yang banyak digunakan untuk membasmi hama buah dan sayur. Apabila masuk ke dalam tubuh bersama dengan sayur-sayuran dan buah-buahan dalam jumlah yang melebihi batas



maksimal, pestisida ini dapat menimbulkan keracunan karena bersifat sebagai racun saraf. Oleh sebab itu, penggunaan pestisida ini dalam sektor pertanian diawasi dengan ketat agar keracunan akibat penggunaan pestisida ini dapat ditekan. Dampak penggunaan terhadap lingkungan tidak terlalu bahaya karena pestisida ini persistensi dalam tanah. Dalam tanah residu pestisida ini hilang atau terurai. Berbagai faktor yang menyebabkan residu pestisida ini hilang atau terurai meliputi pencucian, pelapukan, penguapan, dan enzimatik.

Usaha lain yang telah dilakukan untuk keamanan pangan dengan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan yang dilakukan sebanyak 60 kali di 18 Kapanewon. Untuk memberikan jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Salah satu yang diatur dalam Permentan ini adalah tentang mekanisme pendaftaran pangan segar asal tumbuhan sebagai bentuk penjaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan bagi masyarakat. Permentan ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari peredaran pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutunya dan sekaligus kepastian hukum bagi produsen.

Untuk pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran PSAT harus memenuhi persyaratan Keamanan PSAT. Persyaratan Keamanan PSAT yang dimaksud adalah tidak mengandung cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang melebihi ambang batas; dan tidak menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaannya.

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



Gambar III.2. Contoh Dokumen NIB dan Registrasi PSAT

Selama tahun 2023 sampai 2024, terdapat baru 10 izin edar sudah diterbitkan untuk pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan baik milik perorangan atau milik poktan/gapoktan. Untuk mendapatkan perizinan berusaha registrasi PSAT-PDUK, pelaku usaha terlebih dahulu harus memiliki izin usaha yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku usaha PSAT mikro kecil dapat mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi OSS : <https://oss.go.id> dengan memilih kelompok usaha yang dimiliki disesuaikan dengan Kriteria Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk Registrasi PSAT-PDUK.

Tabel III.32 Klasifikasi Lapangan Usaha Baku Indonesia (KBLI)

No KBLI	Uraian
01630	Jasa Pasca Panen
47111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di minimarket/ supermarket/ hypermarket
47211	Perdagangan eceran padi dan palawija
47212	Perdagangan eceran buah-buahan
47213	Perdagangan eceran sayuran
47219	Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya
47241	Perdagangan eceran beras
10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran
10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)



No KBLI	Uraian
10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)
10631	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras
10632	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung)
10772	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan

Elemen-elemen penanganan yang baik pangan segar asal tumbuhan terdiri dari unsur lokasi (5 persyaratan), Bangunan dan Fasilitas Bangunan Penyimpanan (27), Fasilitas Sanitasi (18), Mesin dan Peralatan dan Sarana Pendukung (7), Bahan (3), Pengawasan Proses (2), produk akhir (3), Karyawan (7), Pengemas (2), Label dan Keterangan Produk (4), Penyimpanan (6), Pemeliharaan dan Program Sanitasi (9), Pengangkutan (5), Dokumen dan Pencatatan (4), Pelatihan (1), dan Pemenuhan persyaratan ekspor untuk izin rumah pengemasan (1) dengan total 104 jumlah persyaratan.

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerantanan Pangan (FSVA) dibangun dari beberapa indikator yang terdiri dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan.

Pada aspek ketersediaan pangan, mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar



sebelum sampai ke rumahtangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah. Untuk menggambarkan situasi ketersediaan pangan dalam penyusunan FSVA

Kabupaten, maka indikator yang digunakan adalah: (1) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk; dan (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga.



Aspek Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat di akses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi, keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau, modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.



Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masapertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten/Kota, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah



rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

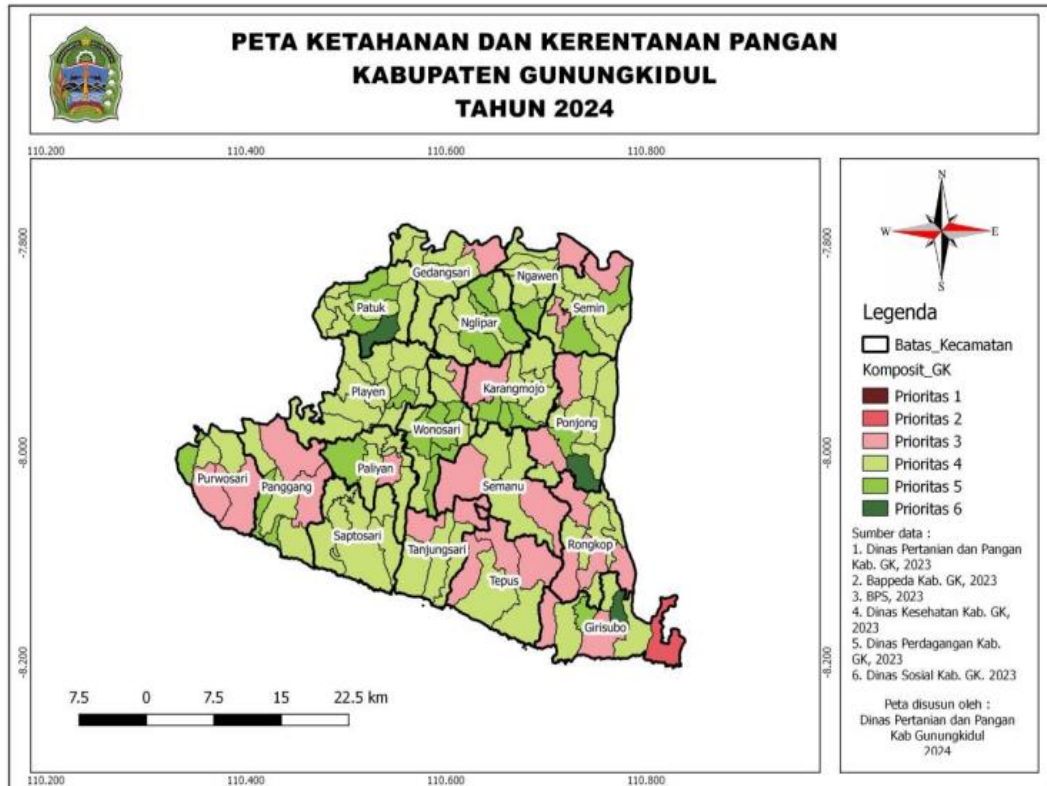
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersama masyarakat berupaya untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan secara lebih merata. Hasil analisis FSVA 2024 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 27 kalurahan dari 144 kalurahan (19%) yang terdiri dari 0 kalurahan (0%) Prioritas 1; 1 kalurahan (1%) Prioritas 2; dan 26 kalurahan (18%) Prioritas 3. Kalurahan Prioritas 1 tidak ada. Kalurahan Prioritas 2 tersebar di 1 kalurahan di Kalurahan Songbanyu Kapanewon Giri Subo. Kalurahan Prioritas 3 tersebar di 26 kalurahan yaitu Kalurahan Karangtengah Kapanewon Wonosari; Kalurahan Mulusan Kapanewon Paliyan; Kalurahan Girisekar, Girisuko Kapanewon Panggang; Kalurahan Giripanggung, Sumberwungu, Sidoharjo Kapanewon Tepus; Kalurahan Pacarejo, Dadapayu Kapanewon Semanu; Kalurahan Bejiharjo Kapanewon Karangmojo; Kalurahan Umbulrejo, Sidorejo Kapanewon Ponjong; Kalurahan Pringombo, Botodayaan, Pucanganom, Melikan Kapanewon Rongkop; Kalurahan Kemejing, Candirejo Kapanewon Semin; Kalurahan Sambirejo Kapanewon Ngawen; Kalurahan Tegalrejo Kapanewon Gedangsari; Kalurahan Balong, Tileng Kapanewon Girisubo; Kalurahan Hargosari, Kemiri Kapanewon Tanjungsari dan Kalurahan Giripurwo, Giricahyo Kapanewon Purwosari.

Karakteristik kalurahan rentan pangan ditandai dengan aspek akses pangan kurang memadai, jumlah penduduk kurang mampu karena daya beli masyarakat kurang dan aspek pemanfaatan pangan/jumlah tenaga kesehatan kurang memadai. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan kalurahan diarahkan pada kegiatan:

- a. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, peningkatan intensifikasi lahan pertanian; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.



- b. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- c. Penyediaan tenaga kesehatan



Gambar III.3 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024

Dinas Pertanian dan Pangan melalui Bidang Ketahanan Pangan juga menggunakan anggaran khusus Dana Keistimewaan untuk menghidupkan kembali tradisi pertanian di Yogyakarta yaitu memanfaatkan lahan pekarangan rumah tangga untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan prinsip: kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumber pangan lokal, pelestarian sumber daya genetik pangan, dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat dengan kegiatan “LUMBUNG MATARAMAN”.

Lumbung Mataraman bukanlah bangunan fisik tetapi lumbung pangan hidup yang berbasis dari rumah tangga dan dalam pengembangannya diharapkan menjadi lumbung pangan desa yang dapat mendukung ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan di wilayah DIY. Melalui



Lumbung Mataraman yang dikelola untuk usaha pertanian terpadu masyarakat dapat memiliki penghasilan tambahan. Kegiatan Lumbung Mataraman dilakukan di 6 Kelompok Wanita Tani, yaitu KWT Sedyo Mulyo Bintaos, Sidoarjo, Tepus; KWT Ngudi Rukun Banjaran, Karangasem, Paliyan; KWT Zulfa Puntuk wetan, Ngler; KWT Ngudi Rejeki Dringo, Bendung, Semin; KWT Tani Maju Wediutah, Ngeposari, Semanu; dan KWT Ngudi Makmur Wungreji, Pengkol, Nglipar. Kinerja fisik kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman, meliputi 6 (enam) komponen, yaitu Bale Winih, Panggon Tuladha, Tanduran Warga, Ternak Ayam KUB, Ternak Lele, dan Pasca Panen dengan indikator manfaat yang ingin dicapai adalah peningkatan frekuensi konsumsi sayuran, buah, dan protein hewani pada 6 (enam) KWT penerima kegiatan Lumbung Mataraman.



Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Belum optimalnya stabilisasi harga dan pasokan pangan;
2. Ketersediaan pangan sudah mencukupi secara agregat, namun masih kurang beragam dan mayoritas tersedia hanya saat musim panen



3. Keterjangkauan pangan dan belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat di tingkat daerah;
4. Konsumsi pangan dan belum optimalnya penerapan pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) di masyarakat;
5. Masih terdapatnya produk pangan yang belum memenuhi standar keamanan pangan.
6. Kerawanan pangan adalah kondisi masyarakat, daerah atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
7. Ketergantungan konsumsi pangan masyarakat terhadap pangan beras masih sekitar 87,80 kg/kapita/tahun.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan pemanfaatan pekarangan
2. Kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai panganekaragaman pangan
3. Sosialisasi khusus bagi para penyedia jasa boga, terutama yang menyediakan konsumsi bagi rapat-rapat di OPDFaktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Tercapainya indikator skor PPH didukung pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang didorong oleh perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pangan yang memenuhi kaidah B2SA.
2. Kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya B2SA terus digalakkan dan disebarluaskan kepada masyarakat, salah satunya melalui usaha pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari).



3. Pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga sebagai sumber pemenuhan gizi keluarga sehingga pola konsumsi B2SA dapat tercapai.
4. Aspek distribusi dan akses pangan yang terus diperkuat dan ditingkatkan.

Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator sasaran Nilai AKIP PD ini merupakan sasaran dan indikator kinerja pendukung pencapaian IKU. Evaluasi pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator sasaran Nilai AKIP PD adalah berdasarkan LHE AKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Nilai AKIP yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja tahun 2024 adalah realisasi Nilai AKIP PD t-1 atau Nilai AKIP PD tahun 2023 yaitu sebesar 81,33. Dengan target Nilai AKIP PD tahun 2023 sebesar 80,30, maka capaian kinerjanya sebesar 101,28% dan termasuk kategori sangat tinggi.

Tabel III.33 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Menunjukkan nilai lapora hasil Evaluasi SAKIP DPP pada t-1

Tabel III.34 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2024			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	A (80,30)	A (81,33)	101,28	Sangat Tinggi



Tabel III.35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2024 serta
Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
		2023	2024		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	A (80,90)	A (81,33)	A(80,50)	100,03

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 sesuai surat Nomor 700.1.2.7/Ev-LKJIP/010 Tanggal 28 Maret 2024 menunjukkan kategori peringkat A (80,90) dengan interpretasi Dinas Pertanian dan Pangan menunjukkan predikat memuaskan yang ditandai dengan terdapat gambaran bahwa instansi/pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/Sub Koordinator. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.36 Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,37
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,33
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,79
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	19,85
JUMLAH		100%	19,85
PREDIKAT			A

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari



kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Tabel III.37 Capaian Kinerja Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	101,03	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100 Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Permasalahan:

1. Berkurangnya pegawai /personil karena adanya mutasi/alih tugas/pensiun,
2. Ketersediaan, pengolahan, dan penyajian arsip belum maksimal

Solusi:

1. Pemutakhiran data base kepegawaian
2. Pelatihan kearsipan, kepegawaian, barang jasa, dan perencanaan



B. Analisa Program/Kegiatan yang Terkait dengan PUG

Pengarusutamaan Gender yang lebih dikenal dengan PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integral mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pelaksanaan PUG dalam pembangunan merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan control, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap Pembangunan. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah. Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender*



Budget Statements) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Beberapa program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam penerapan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pertanian ada dalam dokumentasi berikut:

- Partisipasi Perempuan dalam Proses Perencanaan



- Bantuan Alat Mesin Kepada Kelompok Wanita Tani



- Partisipasi Anak Sekolah Dalam Pemanfaatan Pekarangan di Sekolah





C. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2024 Dinas Pertanian dan Pangan mendapatkan beberapa capaian dan penghargaan, yaitu:

1. Penghargaan Prestasi Bidang Pertanian DIY 2024 Juara II Gapoktan Berprestasi (Gapoktan Sedar, Kalurahan Gari) Penghargaan diberikan pada tanggal 13 Juni 2024 di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
2. Penghargaan Prestasi Bidang Pertanian Tingkat DIY 2024 BPP Berprestasi (Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul) Penghargaan diberikan pada tanggal 13 Juni 2024 di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
3. Penghargaan Prestasi Bidang Pertanian Tingkat DIY 2024 BPP Berprestasi Juara I Petani Berprestasi (Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul) Penghargaan diberikan pada tanggal 13 Juni 2024 di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
4. Penghargaan Prestasi Bidang Pertanian Tingkat DIY 2024 Juara I Penyuluh Teladan (Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul) Penghargaan diberikan pada tanggal 22 Juli 2024 di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
5. Anugerah Krenovamaskat Pelita Indah Tahun 2024 Juara III
6. Reward Kartu Tani Terbaik Juara III Tingkat Kabupaten Kota dari Bank BRI

D. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPPA-SKPD Nomor DPAA/ A.6/ 3.27.2.09.0.00.01.0000/ 001/ 2024 Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul semula



Rp19.306.921.271,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp20.991.950.279,00 atau bertambah Rp1.685.029.008,00.

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel III.38 berikut:

Tabel III.38 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (Rp)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	414.491.500				
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	101.671.500	99.999.500	98,36	1.672.000	3,93
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	66.289.000	65.401.500	98,66	887.500	1,56
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	5.289.000	5.289.000	100,00	-	-
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	56.950.000	56.062.500	98,44	887.500	1,56
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	4.050.000	4.050.000	100,00	-	-
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	35.382.500	34.598.000	97,78	784.500	2,37
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2.350.000	2.350.000	100,00	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	33.032.500	32.248.000	97,63	784.500	2,37
2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	4.740.000	4.738.500	99,97	1.500	0
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.740.000	4.738.500	99,97	1.500	0,03

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (Rp)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	4.740.000	4.738.500	99,97	1.500	0,03
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	8.535.000	7.855.000	92,03	680.000	16
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	8.535.000	7.855.000	92,03	680.000	16,00
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4.200.000	3.775.000	89,88	425.000	10,12
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4.335.000	4.080.000	94,12	255.000	5,88
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	299.545.000	298.985.000	99,81	560.000	0,19
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	299.545.000	298.985.000	99,81	560.000	0,19
	Pengembangan Lumbung Mataraman	299.545.000	298.985.000	99,81	560.000	0,19
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.759.865.779				
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.804.761.879	10.733.746.291	83,83	2.071.015.588	57,18
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.410.000	175.042.350	98,11	3.367.650	2,07
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	163.455.000	160.087.455	97,94	3.367.545	2,06
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	999.975	100,00	25	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.498.000	1.498.000	100,00	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.249.000	1.249.000	100,00	-	-

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (Rp)
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	748.000	748.000	100,00	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.900.000	7.900.000	100,00	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.560.000	2.559.920	100,00	80	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.853.050.178	8.872.531.825	81,75	1.980.518.353	20
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.780.576.178	8.801.422.925	81,64	1.979.153.253	18,36
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.599.000	3.599.000	100,00	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	68.875.000	67.509.900	98,02	1.365.100	1,98
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.684.900	59.720.388	84,49	10.964.512	15,51
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	70.684.900	59.720.388	84,49	10.964.512	15,51
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.254.500	94.702.372	89,97	10.552.128	10,03
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.957.500	3.957.500	100,00	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.910.000	20.910.000	100,00	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.326.000	2.326.000	100,00	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.060.000	5.060.000	100,00	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	100,00	-	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	4.299.925	71,67	1.700.075	28,33
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.801.000	56.948.947	86,55	8.852.053	13,45
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	180.781.200	174.590.000	96,58	6.191.200	3,42
	Pengadaan Mebel	15.980.000	15.510.000	97,06	470.000	2,94
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	164.801.200	159.080.000	96,53	5.721.200	3,47

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (Rp)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.114.481.101	1.057.060.056	94,85	57.421.045	5,15
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000	1.350.000	79,41	350.000	20,59
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.112.181.101	1.055.110.056	94,87	57.071.045	5,13
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000	600.000	100,00	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.100.000	300.099.300	99,34	2.000.700	0,66
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	172.500.000	172.444.300	99,97	55.700	0,03
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.100.000	5.100.000	100,00	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	118.500.000	116.555.000	98,36	1.945.000	1,64
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	6.000.000	100,00	-	-
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.831.636.700	1.758.840.599	96,03	72.796.101	3,97
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.540.027.100	1.503.044.253	97,60	36.982.847	2,40
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	150.927.000	149.261.940	98,90	1.665.060	1,10
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.389.100.100	1.353.782.313	97,46	35.317.787	2,54
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	291.609.600	255.796.346	87,72	35.813.254	12,28
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	291.609.600	255.796.346	87,72	35.813.254	12,28
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.589.535.400	4.578.351.253	99,76	11.184.147	0,2437

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (Rp)
	Pengembangan Prasarana Pertanian	273.175.400	266.991.253	97,74	6.184.147	2,26
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	241.965.400	235.781.253	97,44	6.184.147	2,56
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	31.210.000	31.210.000	100,00	-	-
	Pembangunan Prasarana Pertanian	4.316.360.000	4.311.360.000	99,88	5.000.000	0,12
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	500.000.000	500.000.000	100,00	-	-
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	200.000.000	200.000.000	100,00	-	-
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.616.360.000	3.611.360.000	99,86	5.000.000	0,14
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	42.297.500	41.615.000	98,39	682.500	1,61
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	42.297.500	41.615.000	98,39	682.500	1,61
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	42.297.500	41.615.000	98,39	682.500	1,61
9	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.491.634.300	1.476.911.800	99,01	14.722.500	0,99
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.491.634.300	1.476.911.800	99,01	14.722.500	0,99
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	315.500.000	315.500.000	100,00	-	-
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kec. dan Desa	235.664.500	228.079.500	96,78	7.585.000	3,22
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	940.469.800	933.332.300	99,24	7.137.500	0,76
		21.174.357.279	19.001.042.943	89,74	2.173.314.336	

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2024 Sub Bagian Perencanaan



Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.39 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi
1	Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Meningkat	1.615.540,28	1.221.580,67	91,80	7.955.103.900	7.855.718.652	939	1,25
2	Ketahanan Pangan Meningkat	90	91,4	101,56	755.293.800	748.085.030	99,05	0,95
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80,3	81,33	101,28	10.850.273.705	10.728.883.108	98,88	1,12
Jumlah Belanja Total					20.005.947.365	19.774.071.489	98,84	1,16
Jumlah Belanja Program Utama					9.155.673.660	9.045.188.381	98,79	1,21
Jumlah Belanja Program Penunjang					10.850.273.705	10.728.883.108	98,88	1,12

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Dinas Pertanian dan Pangan, 2024

Berdasarkan tabel III.38 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul belum mencapai target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp20.005.947.365.00 terealisasi Rp19.774.071.489 atau 98,88% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp21.733.143,36 atau 1,21% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Belanja yang tidak direalisasikan karena selisih pembayaran belanja pada Tenaga Harian lepas



E. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pelaksanaan pasar tani. merupakan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Pangan untuk meningkatkan akses petani secara langsung dengan konsumen dan pasar, membangun jaringan pemasaran dan menyediakan sarana pemasaran sebagai ajang promosi, penumbuhan rasa cinta terhadap produk lokal.



BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul di antaranya:

a. Urusan Pertanian

- Sebagian produk pertanian mengalami kesulitan pemasaran akibat kurangnya jejaring pemasaran
- Dampak pemanasan global yang memicu perubahan iklim.
- Regenerasi petani masih sulit dilakukan.
- Pengendalian alih fungsi lahan pertanian belum

b. Urusan Pangan

- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Gunungkidul telah menunjukkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul saat ini sudah baik. Akan tetapi terdapat jenis pangan yang nilai konsumsinya melebihi nilai standar yaitu padi-padian dan sayur dan buah. Terdapat juga jenis pangan yang nilai konsumsinya dibawah nilai standar yaitu pangan hewani.
- Pelaksanaan perizinan berusaha melalui aplikasi terintegrasi secara elektronik Online Single Submission (OSS) sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko membutuhkan



kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan penjamin mutu, dan ketersediaan sarana prasana yang memadai. Saat ini baru 10 pelaku usaha yang mengajukan PSAT.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

a. Urusan Pertanian

1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para petani dalam hal mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.
2. Membina dan Sosialisasi ke Komunikasi Petani Milenial
3. Terbitnya SK Bupati Gunungkidul Nomor 132/KPTS/2024 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 untuk peningkatan produksi pertanian dan pengalokasian yang cukup sesuai kebutuhan.

b. Urusan Pangan

1. Meningkatkan promosi dan kampanye sumber pangan karbohidrat pangan lokal non beras sebagai sumber pangan alternatif serta edukasi pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan menggunakan berbagai media, terutama media sosial yang banyak dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Sosialisasi perizinan berbasis OSS di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

Rencana tindak lanjut Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul ke depannya yaitu:

a. Urusan Pertanian

1. Memperbanyak sosialisasi dan pelatihan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim bagi petani.



2. Menyelenggarakan berbagai pelatihan usaha tani dan manajerial pertanian terutama untuk komoditas-komoditas yang memiliki nilai jual yang tinggi
3. Sosialisasi Perda dan Perbup yang baru serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pihak terkait dalam rangka implementasi peraturan-peraturan tersebut.

b. Urusan Pangan

1. Melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan promosi B2SA melalui berbagai media.
2. Penyiapan SDM yang kompeten untuk menangani OSS dan menempatkan personil tersebut secara permanen sebagai bagian pelaksana perizinan, dan melengkapi sarana prasarana penunjang layanan OSS agar dapat memenuhi tuntutan kecepatan dan ketepatan layanan.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤꦶꦏꦠꦺꦴꦫꦤ꧀

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539
Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 28 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.7 / Ev. LKJIP / 010
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) pada Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2023

Yth. Bupati Gunungkidul
di
Wonosari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 08/Ev-ITDA/LKJIP/2024 tanggal 1 Maret 2024 kami telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 mulai tanggal 4 Maret sampai dengan 6 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Instansi Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya

perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

- a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP Instansi adalah sebagaimana terlampir. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i>. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga

Predikat	Interpretasi
	masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Kondisi

a. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), DPA, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia.

- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik.
- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

- Tidak terdapat catatan Hasil Evaluasi.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup keberadaan pedoman teknis dan mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan namun belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, namun belum dijadikan dasar penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

- 1) Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 2) SOP Pengumpulan Data Kinerja perlu direvisi.
- 3) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.
- 4) Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja belum memenuhi standar.
- 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

- 1) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- 2) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup keberadaan pedoman teknis evaluasi, kualitas evaluasi, pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan. namun belum terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.
- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat namun belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan di masa akan datang, yaitu:

- a. Perencanaan Kinerja
 - Tidak terdapat rekomendasi.
- b. Pengukuran Kinerja
 - 1) Melakukan review SOP Pengumpulan Data Kinerja sebagai dasar mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
 - 2) Pengukuran kinerja agar dipergunakan sebagai dasar dalam penyesuaian kebijakan untuk mencapai kinerja.
 - 3) Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- c. Pelaporan Kinerja
 - 1) Melakukan koordinasi dan sosialisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai.
 - 2) Informasi dalam laporan kinerja berkala agar digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, memperoleh nilai sebesar 81,33 (delapan puluh satu koma tiga tiga) dengan kategori A (memuaskan), dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30 %	25,37
2	Pengukuran Kinerja	30 %	23,33
3	Pelaporan Kinerja	15 %	12,79
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	19,85
Jumlah		100 %	81,33

Poin 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka unit kerja/instansi pemerintah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

3. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari Tim SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023, mohon menjadikan periksa.

INSPEKTUR



SAPTOYO, S.SOS, M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Wibisono

Jalan Taman Bhakti 2, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telepon (0274) 391317; Faksimile (0274) 391317
Laman www.pertanian.gunungkidulkab.go.id; Posel pertanian@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 16 April 2024

Nomor : B/700.1.2.7/590/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut LHE AKIP Pada
Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2023

Yth.

Inspektur Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Dalam rangka menindaklanjuti surat Inspektur Daerah Nomor 700.1.2.7/Ev.LKJIP/010 tanggal 28 Maret 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023, maka dengan ini kami kirimkan tindak lanjut dari surat tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perkenaanannya diucapkan terimakasih.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS	ls
SUB KOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN	I.



Kepala Dinas Pertanian
dan Pangan,

RISMIYADI, SP., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197410121999031008

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023

No	KONDISI	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	PERENCANAAN KINERJA		
a	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	----	NIHIL
b	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik	----	NIHIL
c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	----	NIHIL
2	PENGUKURAN KINERJA		
a	Pengukuran kinerja telah dilakukan namun belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Melakukan review SOP Pengumpulan Data Kinerja sebagai dasar mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang digunakan Dinas Pertanian dan Pangan adalah Perbup Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 239/ KPTS/ 2020 tentang SOP Pengumpulan Data Kinerja Tindak lanjut yang akan dilakukan dengan menyusun review standar operasional prosedur (SOP) yang baku mengenai mekanisme pengumpulan data kinerja yang dibutuhkan dalam penyusunan LKjIP. dan ditetapkan melalui Evaluasi SOP 2024

No	KONDISI	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
b	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telaah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Pengukuran kinerja agar dipergunakan sebagai dasar dalam penyesuaian kebijakan untuk mencapai kinerja	Dalam Pengukuran Kinerja (Laporan TEPR/ Laporan pengendalian), Pimpinan telah terlibat sebagai pengambil keputusan dan telah memanfaatkan teknologi informasi dalam hal pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja. Tindak lanjut yang dilakukan dengan mengoptimalkan setiap level organisasi untuk melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya.
c	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , namun belum dijadikan dasar penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul digunakan sebagai dasar penyesuaian tunjangan kinerja Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam hal pengukuran kinerja dengan melakukan sosialisasi tentang tambahan penghasilan PNS dalam bentuk undangan, daftar hadir dan notulen sosialisasi
3	PELAPORAN KINERJA		
a	Telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	Melakukan koordinasi dan sosialisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai	Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala, telah diformalkan, telah direview, dipublikasikan dan telah disampaikan tepat waktu

No	KONDISI	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
b	Dokumen Laporan Kinerja belum memenuhi standar	Informasi dalam laporan kinerja berkala agar digunakan sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai standar dengan menyajikan informasi realisasi kinerja dengan target tahunan serta akan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya Tindak lanjut akan dilaksanakan pada penyampaian informasi atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/ atau hambatannya, efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta perbandingan realisasi kinerja di level provinsi/ pusat.
c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya		
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan namun belum terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Hasil evaluasi kinerja internal agar dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja	Pedoman yang digunakan Permen Pan & RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tindak lanjut akan dilakukan dalam hal evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit dan dilaksanakan secara berjenjang

No	KONDISI	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai		
c	Implementasi SAKIP telah meningkat namun belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja		

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS	b
SUB KOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN	p



Kepala Dinas Pertanian
dan Pangan,

RISMIYADI, SP., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197410121999031008



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

ꦑꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦠꦤ꧀ꦥꦠꦤꦶꦤ꧀ꦢꦤꦥꦁꦤ꧀

Jalan Taman Bhakti 2 Wonosari, Gunungkidul KodePos 55812

Telepon: (0274) 391317, Faksimile: (0274) 391317

Posel: pertanian@gunungkidulkab.go.id, Laman: pertanian.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISMIYADI, SP. M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : H. SUNARYANTA

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. SUNARYANTA

Wonosari,
Pihak Kesatu,

RISMIYADI, SP. M.Si

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Produksi tanaman Pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan meningkat	Produksi Tanaman Pangan	ton	1.581.224,78
		Produksi Perkebunan dan Hortikultura	ton	34.056,68
2	Ketahanan Pangan meningkat	Capaian Skor PPH Konsumsi	indeks	90
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP DPP	nilai	A (80,30)

Program		Anggaran		Keterangan
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	46.471.500,00	DAU
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	4.740.000,00	DAU
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	8.535.000,00	DAU
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp	300.000.000,00	DAIS
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	1.746.986.700,00	DAU
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	4.558.375.400,00	DAU DBH-CHT DAK F
7	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	42.097.500,00	DAU
8	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	1.526.674.300,00	DAU DAK F DAK NF
9	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	11.255.447.871,00	DAU

Pihak Kedua,



H.SUNARYANTA

Wonosari,



Pihak Ketiga,

RISMIYADI, SP. M.Si

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
: 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Produksi tanaman Pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan meningkat	Produksi Tanaman Pangan	ton	1.581.224,78
		Produksi Perkebunan dan Hortikultura	ton	34.056,68
2	Ketahanan Pangan meningkat	Capaian Skor PPH Konsumsi	indeks	90
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP DPP	nilai	A (80,30)



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

ꦧꦶꦏꦸꦤꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦢꦶꦤꦱꦼꦥꦠꦤꦶꦪꦤ꧀ꦢꦤꦥꦁꦏꦸꦢꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti 2 Wonosari, Gunungkidul KodePos 55812

Telepon: (0274) 391317, Faksimile: (0274) 391317

Posel: pertanian@gunungkidulkab.go.id, Laman: pertanian.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISMIYADI, SP., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : H. SUNARYANTA

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. SUNARYANTA

Wonosari, 6 Agustus 2024
Pihak Kesatu,

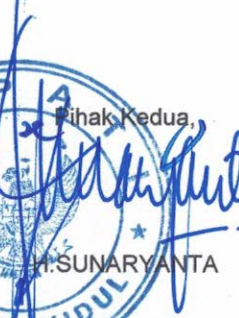
RISMIYADI, SP., M.Si

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2024

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Terwujudnya Pembangunan pertanian yang optimal	Nilai PDRB sub kategori pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan hortikultura	juta rupiah	2.148.400,03

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Produksi tanaman Pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan meningkat	Produksi Tanaman Pangan	ton	1.581.224,78
		Produksi Perkebunan dan Hortikultura	ton	34.315,50
2	Ketahanan Pangan meningkat	Capaian Skor PPH Konsumsi	indeks	90
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP DPP	nilai	A (80,30)

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 46.471.500,00	DAU
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 4.740.000,00	DAU
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 8.535.000,00	DAU
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp 300.000.000,00	DAIS
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 1.746.986.700,00	DAU
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 4.558.375.400,00	DAU, DAK F DBH-CHT
7	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 42.097.500,00	DAU
8	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 1.526.674.300,00	DAU, DAK F DAK NF
9	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.255.447.871,00	DAU

Pihak Kedua,

H. SUNARYANTA

Wonosari, 6 Agustus 2024
Pihak Kesatu

RISMIYADI, SP. M.Si



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**